



SEKKAB SUNGGONO LEPAS ATLET SHORINJI KEMPO BERLAGA DI JEPANG



**PEMBANGUNAN JALAN DESA EMBALUT
DIGUYUR RP 10 MILIAR**



Istimewa

Puluhan atlet Shorinji Kempo Kukar yang akan berlaga di Shorinji Kempo World International Study Session, Jepang.

SEKKAB SUNGGONO LEPAS ATLET SHORINJI KEMPO BERLAGA DI JEPANG

TENGGARONG - Sebanyak 33 atlet Shorinji Kempo asal Kutai Kartanegara (Kukar), dilepas untuk mengikuti Kejuaraan Shorinji Kempo World International Study Session pada Oktober 2023 ini. Sebanyak 33 atlet yang dilepas oleh Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Kukar, Sunggono, ini akan berlaga di Tokyo, Jepang.

Dalam agenda yang berlangsung di Ruang Serbaguna Kantor Bupati Kukar, pada Selasa (3/10/2023) pagi ini, Sunggono pun menaruh rasa bangga kepada para atlet yang dikirim. Diharapkan mampu memberikan hasil yang terbaik, tentunya untuk kemajuan cabang olahraga Shorinji Kempo Kukar di kancah internasional.

"Kita berharap mereka bisa menjaga kekompakan, kebersamaan dan membawa nama baik Kutai Kartanegara," kata Sunggono.

Momen ini juga bisa dimanfaatkan untuk mengenalkan budaya Kukar ke mancanegara khususnya di Jepang. Dan menjadi semangat baru dan menunjukkan kepada dunia bahwa Kutai Kartanegara dapat diperhitungkan. "Bagi atlet Shorinji Kempo untuk bisa terus berprestasi dan mempersembahkan yang terbaik bagi Kutai Kartanegara dan Indonesia," sebutnya.

Dirinya juga berpesan bahwa dalam pertandingan, hasil menang atau kalah adalah hal biasa, yang penting bisa mendapat ilmu dan persaudaraan satu sama lain dan memperoleh prestasi. Para tim Shorinji Kempo Kukar juga diingatkan untuk menjaga kesehatan, menjaga motivasi dan seman-

gat serta fokus pada kejuaraan dan prestasi. "Insyallah perjuangan tidak ada yang sia-sia," pesannya.

Sementara itu Ketua Umum Persaudaraan Shorinji Kempo Indonesia (Perkemi) Pengurus Kabupaten (Pengkab) Kukar, Ahmad Zulfiansyah, selain 33 atlet akan ada 6 pelatih serta manager dan official yang akan mendampingi di kejuaraan internasional ini.

Pihaknya menargetkan bisa merebut juara di semua nomor pertandingan. Minimal medali perak atau perunggu. Namun pihaknya lebih optimis di tingkatan kelas junior untuk meraih medali emas. Sebab berdasarkan pengalaman untuk tingkatan junior pihaknya lebih banyak peluang dan lebih unggul, pesaing terberat hanya atlet asal Jepang.

"Untuk yang junior kita target emas," kata Zulfiansyah.

Dalam kejuaraan internasional ini pihaknya juga telah melakukan persiapan panjang dan terus berlatih, mulai dari keikutsertaan kejuaraan Prapon serta seleksi Popnas yang diikuti oleh para atlet.

"Hampir 6-8 bulan karena kita mempersiapkan dari event sebelumnya, sebelum melangkah ke kejuaraan dunia," lanjutnya.

Tim Shorinji Kempo Kukar di dalam kejuaraan internasional nantinya juga akan membawa misi mengenalkan budaya yang ada di Kutai Kartanegara. Di mana para atlet nanti akan tampil dihadapan para peserta dengan membawakan tarian khas Kutai dan Dayak. (adv)

Penulis : Muhammad Rafi'i
Editor : Nicha Ratnasari



Kades Embalut, Yahya.

Pembangunan Jalan Desa Embalut Diguyur Rp 10 Miliar

TENGGARONG - Desa Embalut yang terletak di Kecamatan Tenggara Seberang, menjadi satu di antara desa yang mendapatkan suntikan dana pembangunan yang lumayan besar. Di mana pada tahun 2023 saja, sebanyak Rp 15 miliar yang dialokasikan untuk Desa Embalut.

Sebagian besar dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur jalan di Desa Embalut. Untuk jalan sepanjang 1,8 kilometer yang menghabiskan anggaran sebesar Rp 10 miliar. Untuk proses pembangunan jalan semenisasi menuju jalan poros Kecamatan Tenggara Seberang.

Pembangunan jalan pun diklaim hampir rampung. Saat ini memasuki tahapan pengeringan semenisasi. Dan segera bisa dipakai oleh warganya. "Luar biasa di era Edi-Rendi ini. Alhamdulillah ini lagi pembangunan jalan semenisasi yang puluhan tahun kami tunggu-tunggu," ujar Kades Embalut,

Yahya.

Dengan adanya jalan semenisasi yang sedang dikerjakan ini, diharapkan mampu meningkatkan ekonomi warganya. Mobilitas barang dan jasa pun menjadi lancar. Belum lagi bagi warganya yang ingin bekerja dan pergi ke sekolah kini menjadi lebih nyaman. Mengingat dulu ketika hujan turun, jalan sangat sulit dilintasi. "Dulu kan kalau hujan susah (dilewati)," lanjutnya.

Tidak hanya kucuran dari APBD Kukar saja yang mengalir deras ke Desa Embalut. Tahun ini pun, sebanyak 14 bangunan kelas di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Tenggara Seberang dibangun menggunakan Dana Alokasi Khusus (DAK) APBN 2023.

"Ini lagi hampir finishing, hampir selesai. Bangunan lokal untuk kegiatan belajar dan lab ada 14 lokal," tutupnya. (adv)

Penulis : Muhammad Rafi'i
Editor : Nicha Ratnasari



Kantor Kelurahan Loa Ipuh.

Rafi'i/Media Kaltim

Tak Lagi Representatif, Kantor Kelurahan Loa Ipuh akan Dibangun Ulang

TENGGARONG - Tidak lagi representatif, kantor Kelurahan Loa Ipuh, yang berada di Jalan Mangkuraja, Tenggarong akan segera dibangun ulang, namun dengan lokasi yang berbeda. Rencana pemindahan ini pun sudah dilayangkan ke Dinas Pekerjaan Umum Kutai Kartanegara (DPU Kukar). Dan tindaklanjuti dengan pematangan proposal pembangunannya.

Lokasinya pun tidak jauh dari kantor induk yang ada sekarang. Tepatnya di Jalan Penyinggahan, berlokasi di lapangan tembak dekat Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDDI).

Lurah Loa Ipuh, Erri Suparjan, menyebutkan bahwa kantor kelurahan yang ada perlu rehabilitasi berat. Terlebih lokasi kantor Kelurahan Loa Ipuh yang sekarang berada di sepadan Sungai Mahakam yang masuk dalam Ruang Terbuka Hijau (RTH). Serta masuk dalam pemetaan oleh Balai Wilayah Sungai (BWS) Kalimantan Timur (Kaltim).

"Jadi kami berpikir sekalian saja kita pin-

dahkan itu. Nanti kedepannya terserah kepada pemerintah, mudah-mudahan (kantor Kelurahan Loa Ipuh yang sekarang) bisa dipergunakan untuk kepentingan-kepentingan lain," ujar Erri.

Alasan lainnya, karena kantor yang ada saat ini sangat rentan banjir saat debit anak Sungai Mahakam sedang naik. Ditambah struktur dan kondisi bangunan kantor yang sudah termakan usia.

Ia pun tidak berani menyampaikan berapa besaran anggaran yang digunakan untuk proses pembangunan kantor kelurahan Loa Ipuh yang rencananya dibangun 2024 mendatang. Menyerahkan kepada DPU Kukar yang memang lebih kompeten dalam melakukan perhitungannya.

"Kalau memang setahun bisa selesai Alhamdulillah kita bisa memfungsikan kantor yang baru itu. Target kita mudah-mudahan tahun depan bisa terbangun," tutupnya. (adv)

Penulis : Muhammad Rafi'i

Editor : Nicha Ratnasari



Istimewa

Lurah Loa Ipuh, Erri Suparjan.

Sebanyak 77 RT di Kelurahan Loa Ipuh Bakal Dimekarkan

TENGGARONG - Pemekaran wilayah Kelurahan Loa Ipuh, hingga saat ini terus berproses. Di mana sudah menyentuh angka 90 persen, Kelurahan Loa Ipuh disepakati akan dibagi menjadi 3 bagian. Masing-masing Kelurahan Loa Ipuh, Loa Ipuh Seberang dan Loa Ipuh Tengah.

Dijelaskan oleh Lurah Loa Ipuh, Erri Suparjan, Loa Ipuh induk akan diisi Rukun Tetangga (RT) yang berada di kawasan Jalan Loa Ipuh. Kelurahan Loa Ipuh Seberang akan diisi bagian dari Jalan Gunung Belah sampai kawasan Jalan Kartini. Selanjutnya Kelurahan Loa Ipuh Tengah akan berbatasan dengan Kelurahan Mangkurawang, Maluhu dan Loa Ipuh Darat.

Untuk lokasi Kelurahan Loa Ipuh Tengah, dikatakan oleh Erri masih jadi kendala di penyiapan lahan untuk pembangunannya. Sarana dan prasarananya di daerah Kelurahan Loa Ipuh Tengah masih

terkendala lahan untuk bangunan persiapan kantor.

"Karena yang awalnya kita persiapkan itu kemarin ternyata terbentur dengan HGU, itu yang jadi kendala dari pihak kelurahan," ungkap Erri.

Erri melanjutkan, sebanyak 77 RT yang akan dibagi menjadi 3 wilayah tadi. Namun berdasarkan data darinya, terbanyak nantinya RT akan berada Kelurahan Loa Ipuh Seberang.

Ia pun menyebut pemekaran Kelurahan Loa Ipuh akan dikerjakan secepatnya. Kini sedang mengejar berbagai persiapannya. Dengan harapan pada tahun 2025 mendatang sudah klir dan bisa dilakukan pemekaran.

"Kita baru sampai pembahasan saprasnya saja belum ke SDM. Kalau SDM kita serahkan kepada BKPSDM Kukar," tutupnya. (adv)

Penulis : Muhammad Rafi'i
Editor : Nicha Ratnasari



Ilustrasi. Perundungan yang terjadi pada anak. (Istimewa)

Antisipasi Tindak Perundungan, DP3A Kukar Sosialisasi ke Sekolah-sekolah

TENGGARONG - Viral di jagad maya kasus perundungan terhadap anak dibawah umur yang berujung pada kekerasan. Mirisnya, pelakunya pun masih di bawah umur yang notabene merupakan teman sekolah. Di Balikpapan misalnya, perundungan yang dilakukan di area masjid, berujung hingga ke ranah hukum.

Melihat ini, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kutai Kartanegara (Kukar) pun mengambil sikap. Dengan melakukan langkah konkret berupa sosialisasi ke sekolah-sekolah. Bahkan sepanjang September saja, sudah lima sekolah di lima kecamatan yang disambangi.

Kepala Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak (PHP-2KH), Marhaini, sosialisasi memang sudah dilakukan. Masing-masing di SMAN 1 Kecamatan Muara Badak, SMAN 1 Kecamatan

Merangkayu, SMAN 1 dan SMPN 1 Kecamatan Loa Janan, SMPN 1 Kecamatan Loa Kulu dan SMPN 1 Tenggarong Seberang.

Tidak hanya itu, Bidang PHP2KH pun melaksanakan bimbingan teknis (bimtek) dan pembimbingan pelatihan, dengan menasar ke sekolah-sekolah. "Alhamdulillah sudah lima kecamatan yang sudah kita laksanakan untuk sosialisasi. Itu salah satu pencegahan dari kasus bullying dan lain-lain," ujar Marhaini, Selasa (3/10/2023).

Untuk penanganan kasus perundungan yang mengarah kepada kekerasan, masih terbilang kecil di Kukar. Sempat terjadi pada tahun 2022, namun tidak sempat heboh dan cepat tertangani. Baik itu penanganan bagi korban, maupun bagi pelaku yang melakukan perundungan. (adv)

Penulis : Muhammad Rafi'i

Editor : Nicha Ratnasari



DAMPAK FENOMENA EL-NINO: DESA RINTIK DAN SUMBER SARI ALAMI KRISIS AIR BERSIH



**POLRES PPU KERAHKAN
SEPERTIGA PERSONEL UNTUK
PENGAMANAN PEMILU 2024**



Proses distribusi air dalam penanganan karhutla di PPU.

DAMPAK FENOMENA EL-NINO: DESA RINTIK DAN SUMBER SARI ALAMI KRISIS AIR BERSIH

PPU - Tidak hanya di Kecamatan Sepaku, Penajam Paser Utara (PPU), krisis air bersih juga melanda Kecamatan Babulu. Musim kemarau kali ini, warga Desa Sumber Sari dan Rintik menghadapi kekeringan sumber air yang serius dan memohon bantuan pemerintah.

Menghadapi situasi ini, Pj Bupati PPU, Makmur Marbun, telah menginstruksikan pengiriman 4 armada tangki air ke kedua desa ini. Langkah ini merupakan komitmen Pemkab PPU dalam membantu masyarakat mengatasi dampak kekeringan.

"Ini merupakan langkah berikutnya dalam upaya pendanaan penanggulangan bencana kekeringan dan juga kebakaran hutan dan lahan (karhutla)," ujarnya pada Senin (2/10/2023).

OPD terkait PPU telah menggelar rapat koordinasi penanggulangan kebakaran dan kekeringan pada Minggu (1/10/2023) malam. Dalam pertemuan tersebut, mereka juga mengundang perwakilan dari Direktorat Jen-

deral Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), A Rino Rio, melalui jalur daring.

"Momentum ini penting untuk mempercepat penanganan bencana kekeringan dan karhutla yang telah memasuki status siaga darurat di wilayah PPU," jelas Makmur.

Selain masalah kekeringan, wilayah PPU telah mengalami lebih dari 30 kasus karhutla sejak Juli 2023. Pemkab PPU juga memberikan perhatian penuh terhadap isu ini.

Setelah melakukan berbagai upaya bersama Polres PPU dan Kodim 0913/PPU dalam menangani karhutla, Makmur menyimpulkan bahwa ada beberapa aspek yang perlu ditingkatkan. Salah satu aspek yang krusial adalah meningkatkan kesadaran masyarakat agar peristiwa karhutla tidak terulang, terutama dalam konteks fenomena El-Nino.

"Kesadaran masyarakat perlu ditingkatkan melalui sosialisasi yang dilakukan oleh seluruh

perangkat daerah, terutama perangkat kecamatan, desa, dusun, dan RT/RW," katanya.

Instruksi terkait akan diumumkan melalui Surat Edaran Bupati PPU yang akan diterbitkan pada hari ini. Makmur juga menegaskan bahwa ia akan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan sosialisasi larangan karhutla di wilayah kecamatan, desa, dusun, serta RT/RW yang dilakukan oleh camat, kepala desa, dan ketua dusun terkait.

Selain itu, sosialisasi mengenai bencana ini juga perlu dilakukan oleh pemuka agama dalam kegiatan keagamaan di tempat ibadah. Hal ini sejalan dengan komitmen semua perangkat daerah dan elemen di PPU untuk bersinergi dalam mengatasi krisis air bersih dan karhutla ini.

"Saya meminta agar deteksi dini selalu dilakukan. Kita tidak boleh menunggu, jika ada masalah, segera laporkan kepada saya agar saya dapat mengambil langkah sebagai kepala daerah," tegasnya. **(SBK)**



Deddy/RadarMedia

Suasana TFG di Polres PPU.

POLRES PPU KERAHKAN SEPERTIGA PERSONEL UNTUK PENGAMANAN PEMILU 2024

PPU - Polres Penajam Paser Utara (PPU) menggelar tactical floor game (TFG) terkait strategi pengamanan tahapan Pemilu 2024. Kegiatan ini berlangsung di Polres PPU bersama forkopimda setempat.

Kapolres PPU, AKBP Hendrik Eka Bahlawan, mengungkapkan bahwa TFG adalah salah satu skenario yang dirancang untuk menghadapi potensi konflik menjelang Pemilu.

"Tujuannya adalah agar personel memahami langkah-langkah yang harus diambil ketika menghadapi situasi yang tidak terkendali dalam tahapan Pemilu 2024," ujar AKBP Hendrik pada Senin (2/10/2023).

Lebih lanjut, TFG ini dilakukan untuk memberikan gambaran dan kesamaan pemahaman, pola pikir, dan tindakan saat terjadi konflik atau kesalahpahaman di lapangan.

"Semua harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab, termasuk penempatan personel, pergerakan pasukan, pengendalian situasi, cara bertindak, dan pelaporan

dalam rangka pengamanan," jelas AKBP Hendrik.

Sementara itu, Kabag Ops Polres PPU, AKP Jajat Sudrajat, menambahkan bahwa ada beberapa tingkat kerawanan, mulai dari kurang rawan, rawan, hingga sangat rawan.

"Namun, di PPU, tidak ada Tempat Pemungutan Suara (TPS) dengan tingkat kerawanan yang sangat tinggi. Hanya ada TPS yang masuk dalam kategori rawan, termasuk 2 TPS khusus yang berada di Ibu Kota Nusantara (IKN)," ungkap Kabag Ops Jajat.

Dari tingkat kerawanan ini, segala persiapan dilakukan untuk mengantisipasi potensi konflik yang mungkin timbul. Sepertiga dari total 554 personel Polres PPU akan dikerahkan dalam pengamanan ini.

"Sepertiga dari total 554 personel Polres PPU akan dikerahkan, dan juga akan melibatkan beberapa personel dari TNI, Satpol PP, Brimob, Pol Air, PM dan Perhubungan, serta BPBD," tutupnya. (NRD)

BKSDA TANGKAP BUAYA DI GUNTUNG, AMBO: CIRI-CIRINYA BUAYA RISKA



BACA HALAMAN A2



PERJALANAN WISATA LITERASI, PELAJARAN DARI PERPUSTAKAAN CISARUA



BKSDA Tangkap Buaya di Guntung, Ambo: Ciri-cirinya Buaya Riska

BONTANG - Buaya berukuran besar berhasil ditangkap oleh Tim Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Kaltim dari perairan Guntung, pada Selasa (3/10/2023) dini hari tadi.

Keberhasilan evakuasi buaya ini melibatkan Tim BKSDA, Polres Bontang, dan Kelurahan Guntung, setelah buaya tersebut sering muncul ke pemukiman warga.

Diduga kuat, buaya jantan yang memiliki panjang sekitar 4 meter dan lebar perut sekitar 70 centimeter ini adalah buaya Riska, yang sebelumnya menjadi perbincangan karena kedekatannya dengan seorang pria bernama Ambo. "Iya benar, tadi malam ada buaya yang

dievakuasi oleh Tim BKSDA," kata Lurah Guntung, Denny Febrian, mengkonfirmasi kejadian tersebut.

Ambo, yang dikonfirmasi melalui pesan di akun Instagramnya, juga membenarkan bahwa buaya yang ditangkap memiliki ciri-ciri yang serupa dengan buaya Riska. "Benar, dari ciri-cirinya, itu adalah buaya Riska yang kami kenal," kata Ambo.

Putri Ambo, Fitriani, saat diwawancara oleh wartawan, mengungkapkan bahwa pihak kepolisian dan BKSDA sudah berjaga di kediaman mereka sejak Senin malam. Pada malam itu, buaya Riska dikatakan sedang berjemur di sekitar

Sungai Kanibungan.

"Karena Riska memang tadi malam berjemur di darat, kakak saya yang lewat saat mancing melihat Riska di situ. Iya, memang ada tim BKSDA tadi malam, karena banyak polisi yang datang ke rumah," ungkapnya.

Fitriani juga menyatakan rasa sedihnya melihat penangkapan buaya yang sudah dianggap sebagai bagian dari keluarga mereka. "Terlalu banyak kenanganmu, sedihnya melihat sungai, orang sudah tidak ada, dia diambil dari rumahnya sendiri. Kejamnya fitnah," kata Fitri.

Editor: Agus Susanto



SYAKURAH/RADARBONTANG

Pers rilis tersangka aborsi.

Polres Bontang Ungkap Motif Pasangan Pelaku Aborsi

BONTANG - Polres Bontang mengungkap motif pasangan yang melakukan aborsi di daerah Kelurahan Tanjung Laut Indah.

Motif tersebut berhasil diungkap pada tanggal 29 September 2023 lalu. Pengakuan tersangka bahwa ia melakukan aborsi pada tanggal 14 September pukul 11.20 Wita bertempat di salah satu penginapan di wilayah Kelurahan Tanjung Laut Indah.

Kedua pelaku adalah pria berinisial SR (23) warga Tanjung Laut dan wanita berinisial MT (21) yang merupakan warga Guntung.

Kronologinya yakni satreskrim menerima laporan dugaan persetubuhan oleh SR. Setelah dilakukan penangkapan dan pendalaman, ditemukan bukti percakapan dan foto yang ada di Handphone SR berupa foto janin dan langsung menangan sang kekasih MT.

"Setelah itu kami langsung melakukan olah TKP, dimana janin tersebut

dikuburkan," jelas Kapolres Bontang AKBP Yusep Dwi Prasetya melalui Kasat Reskrim Iptu Hari Supranoto saat konferensi pers Selasa (3/9/2023) di halaman Mako Polres Bontang.

Mereka mengaborsi dengan menggunakan pil penggugur yang didapatkan SR melalui media sosial. Setelah obatnya datang, pada tanggal 14, MT langsung meminum obat tersebut.

Adapun barang bukti yang didapatkan berupa tulang belulang yang sudah terkubur sekitar 2 minggu, kantong plastik, dan baju yang dijadikan pembungkus janin, handphone dan selimut.

"Untuk barang bukti tulang belulang tidak bisa kami tampilkan, tapi kami serahkan ke RSUD langsung," jelasnya.

Diketahui pasangan tersebut sudah menjalin hubungan selama satu tahun dan sudah sering melakukan hubungan suami istri. Aborsi ini merupakan tindakan mereka agar tidak ada keluarga mereka yang mengetahui bahwa MT

telah hamil.

Janin tersebut sudah berubah 4 bulan, dan saat janin sudah gugur, pasangan tersebut sempat menghubungi temannya untuk menanyakan lokasi yang bisa dijadikan tempat penguburan janin tersebut.

"Temannya yang memberitahu lokasi tanah untuk mengubur janin, kita jadikan saksi. Dan menurut pengakuan yang ia ketahui bahwa tersangka hanya bilang kalau mau mengubur anak kucing yang mati," tambahnya

Keduanya dijerat pasal 77a ayat 1 nomor 35 UU tahun 2014 tentang perlindungan anak yang berbunyi setiap orang yang segera melakukan aborsi terhadap anak yang masih di dalam kandungan dengan alasan dan tata cara yang tidak dibenarkan ketentuan peraturan perundang-undangan akan dipidana penjara paling lama 10 tahun dan denda Rp. 1 miliar.

Penulis: Syakurah
Editor: Yusva Alam



PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG (PBG)

IST

Ilustrasi

30 Persen Bangunan di Bontang Belum Punya Izin PBG

BONTANG - Sebanyak 30 persen bangunan di Kota Bontang belum memiliki izin Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Hal itu diungkapkan Jabatan Fungsional (Jabfung) Penata Perijinan Ahli Muda Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Idrus saat dihubungi, Selasa (3/10/23).

"30 persen itu sudah berupa bangunan yang biasanya di renovasi atau alih fungsi dari rumah menjadi toko, atau tipe bangunan awalnya tipe 35 diperluas menjadi tipe 45," jelasnya.

Ia menjelaskan, bahwa kepengurusan tersebut sering terlambat dilakukan karena dulu saat akan membangun mereka hanya mengurus Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang persyaratan biaya retribusi sebesar Rp 600 ribu dan biaya desain bangunan Rp 2 juta hingga Rp 3 juta, terganti dengan tipe bangunannya.

"Dulu pas masih IMB, yang desain bangunan itu bebas, tidak perlu arsitektur juga tidak apa, lebih murah dan gampang ngurusnya," ujarnya.

Namun semenjak adanya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 16 tahun 2021 tentang peraturan pelaksanaan undang-undang nomor 28 tahun 2002 tentang bangunan gedung, IMB diubah menjadi PBG yang persyaratannya juga ikut berubah.

Kepengurusan PBG harus melibatkan arsitektur yang sudah bersertifikat dan masuk di dalam

Ikatan Arsitektur Indonesia. Dimana arsitektur di Kota Bontang hanya dua yang memenuhi kualifikasi tersebut. Karena untuk arsitek mendapatkan sertifikat harus memenuhi kualifikasi juga.

"Dengan melibatkan arsitektur berkualifikasi tentu harga desain bangunan akan lebih mahal, sekitar Rp 8 juta hingga Rp 10 juta, dan itu bikin mereka berpikir ulang untuk mengurus PBG, karena uangnya bisa dipakai beli material," terangnya.

Untuk harga desain tersebut pemerintah tidak bisa campur tangan, karena penentuan harga tentu ada di arsiteknya langsung. Ia mengungkapkan, masyarakat memang sulit beradaptasi kalau ada perubahan, pihaknya sudah melakukan rapat dengan dinas terkait yang turun langsung ke lapangan untuk mencari solusi.

"Solusi saat ini, mungkin masih dengan mengadakan pemutihan yang dilakukan PUPRK, karena kami hanya mengeluarkan surat izin saja," imbuh Idrus.

Namun, DPMPTSP tidak mengeluarkan izin juga bisa karena faktor lain, seperti batas bangunan yang diperbolehkan untuk membangun rumah atau gedung atau biasa disebut Garis Sempadan Bangunan (GSB) yang masih terlalu dekat dengan jalan atau pintu masuk gang.

Ia mengatakan kendala saat ini adalah dari kementerian, karena hal tersebut ditetapkan langsung berdasarkan aturan yang ada. (sya/adv)



Mantapkan Pengawasan Pemilu 2024, Bawaslu Bontang Gelar Peningkatan Peran Kehumasan

BONTANG - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Bontang menggelar kegiatan Peningkatan Peran Humas dalam rangka persiapan pengawasan Pemilu 2024 di Hotel Bintang Sintuk, Selasa (3/10).

Hadir Koordinator Divisi (Koordiv) Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kaltim, Daini Bunga, Ketua dan Anggota Bawaslu Bontang dan jajaran pengawas se-Kota Bontang. Turut hadir Anggota Bawaslu Bontang periode 2018-2023.

Ketua Bawaslu Kota Bontang, Aldy Artrian, dalam sambutannya, menekankan pentingnya memperkuat lembaga pengawas pemilu.

Sebab, kata dia, banyak pertanyaan publik di lapangan terkait tugas dan kewenangan Bawaslu pada Pemilu 2024. "Jajaran Bawaslu harus mampu menjelaskan apa yang menjadi kewenangannya. Hal ini penting karena seringkali ada kebingungan dari masyarakat antara kewenangan Bawaslu dengan lembaga lain," bebernya.

Menurutnya, di Bawaslu juga mengandung fungsi trias politica di mana fungsi-fungsi tersebut tercermin di penyelenggara pemilu. KPU sebagai penyelenggara teknis dan Bawaslu sebagai pengawas. Sedangkan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, adalah lembaga penegak pelanggaran etik penyelenggara. "Sehingga penting memperhatikan

pembatasan kewenangan untuk menjaga integritas pemilu," tegasnya.

Karena itulah, kata Aldy, produk-produk kehumasan diharapkan dapat menjadi alat yang efektif untuk memosisikan Bawaslu dalam mensosialisasikan tugas-tugas pengawasan di mata publik. "Pengalaman dan pembelajaran dari Bawaslu Periode sebelumnya tetap harus dilanjutkan untuk menghadapi tugas-tugas yang akan datang," bebernya.

Sementara itu, Daini Bunga mengatakan dalam arahannya, menyampaikan bahwa kehumasan di Bawaslu, berperan sebagai garda terdepan dalam memberikan informasi kepada masyarakat.

"Humas berfungsi sebagai penghubung antara lembaga dan publik. Bagaimana eksistensi dan keberadaan Bawaslu dapat dirasakan oleh peserta pemilu adalah hal yang penting. Meskipun ada batasan-batasan yang harus diikuti, Bawaslu tetap harus memberikan pelayanan yang adil dan sama kepada semua peserta pemilu," ungkapinya.

Dalam kesempatan ini, Anggota Bawaslu Bontang periode 2018-2023, yaitu Agus Susanto dan Nasrullah, memberikan materi peningkatan peran humas dalam pengawasan. Dalam kesempatan ini, keduanya juga mendapatkan cinderamata dari Bawaslu Bontang. (MK)



Kelurahan Satimpo Deklarasikan 'Perang' Terhadap Praktik Politik Uang di Pemilu 2024

BONTANG - Kelurahan Satimpo, yang terletak di Kecamatan Bontang Selatan, mendeklarasi perang terhadap praktik politik uang. Deklarasi gerakan "Anti Politik Uang" yang berlangsung Selasa (3/10/2023) ini melibatkan sejumlah pihak.

Termasuk Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Komisi Pemilihan Umum (KPU), Kecamatan Bontang Selatan, Panitia Pemilihan Kecamatan, dan Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) Bontang Selatan.

Tidak hanya itu, kelurahan juga kolaborasi dengan Forum RT, Babinsa, Bhabinkamtibmas, serta Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK) Satimpo.

Dalam kesempatan ini, Lurah Satimpo, Maryono, mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada semua pihak yang terlibat dalam deklarasi.

Maryono berharap langkahnya ini bisa menjadi pilot project bagi kelurahan lain di Bontang dalam upaya melawan politik uang pada Pemilu 2024 mendatang.

"Integritas tidak boleh dijual dengan uang, dan dengan mengikuti prinsip ini, masyarakat dapat menjalankan hak pilihnya secara independen dalam

Pemilu 2024 yang akan datang," tegasnya.

Sementara itu, Ketua Bawaslu Bontang, Aldy Artrian, mengapresiasi inisiatif yang digagas Kelurahan Satimpo. Dia menyatakan bahwa langkah ini merupakan bentuk keberanian dalam melawan politik uang (money politic) dan menilai gerakan ini sebagai dorongan moral yang dapat mempererat hubungan seluruh elemen di Kelurahan Satimpo.

Aldy juga mengingatkan akan bahaya politik uang dan transaksi suara saat Pemilu, yang dapat membuka pintu bagi praktik korupsi ketika seseorang terpilih dengan cara tersebut. Dengan menolak politik, masyarakat Satimpo turut berkontribusi dalam menjaga kehormatan diri mereka sendiri.

"Kami berharap gerakan deklarasi anti politik uang ini tidak akan berhenti hanya di tingkat kelurahan. Semoga gerakan ini dapat terus menyebar kepada seluruh masyarakat Satimpo dan di tempat lain. Dengan komitmen bersama, mari kita bersama-sama mewujudkan Pemilu yang berkualitas dan berintegritas," beber Aldy. (rls)

Editor: Agus Susanto



YAHYA YABO

Ruangan NICU dan alat inkubator yang ada di RSUD Taman Husada Bontang.

Fasilitas Ruang NICU Sudah Tersedia di RSUD, Khusus Bayi Penyakit Sedang hingga Berat

BONTANG – Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Taman Husada Kota Bontang kini telah memiliki Ruang Neonatal Intensive Care Unit (NICU) yang dikhususkan bagi bayi-bayi sakit level penyakit sedang sampai berat. Misalnya, bayi prematur yang bermasalah, bayi dengan berat lahir rendah, bayi yang membutuhkan alat bantu pernapasan, serta bayi dengan kelainan kongenital/bawaan lahir.

Dr. Siti Aisyatur Ridha menjelaskan ruang NICU dikhususkan bagi bayi yang memiliki masalah tersebut di atas dengan batasan usia bayi yang dirawat adalah kisaran usia 0-28 hari.

"Bayi-bayi sakit akan ditempatkan di dalam inkubator dan masuk perawatan ruang NICU," kata dr Ridha saat ditemui Mediakaltim.com.

Untuk lama rawat di NICU bagi bayi yang baru

lahir, dr Ridha mengatakan dapat dievaluasi dari kondisi bayi dan kasus penyakit bayi.

"Masing-masing bayi berbeda kasusnya. Kalau memang butuh alat bantu nafas lama kita fasilitasi di sini dan bila masih bermasalah atau butuh konsultasi khusus misalnya pada bayi dengan kelainan kongenital maka kita koordinasi dengan cara dirujuk ke RS rujukan," katanya.

Ia menambahkan RSUD sendiri memiliki 10 alat inkubator dengan didukung 19 perawat NICU andal yang tersertifikasi dan 3 dokter spesialis anak.

"Semoga RSUD tetap terpercaya dalam memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat apalagi salah satu misi RSUD Bontang adalah menjadi rumah sakit sayang ibu dan bayi," terangnya. **(yah/adv)**



IRT pengedar sabu (kiri) dan pemasoknya.

Nekat Edarkan Sabu, IRT Asal Loktuan dan Pemasoknya Dibekuk Polisi

BONTANG - Usai menangkap seorang pengedar narkoba di Berbas Pantai, pada hari yang sama, Senin (2/10/2023) pukul 21.30 Wita dua pengedar sabu kembali dibekuk.

Dua warga yang bermukim di Jalan Poros Bontang-Sangatta ditangkap. Sr (29) seorang ibu rumah tangga dan pemasoknya berinisial MPS (27) ikut ditangkap.

"Yang pertama kami tangkap itu IRT yang dari identitas KTPnya warga Loktuan. Dia ditangkap di sebuah rumah di Loktuan bersama barang bukti 10 poket sabu seberat 4,94 gram," kata Kapolres

Bontang, AKBP Yusep Dwi Prastiya melalui Kasat Resnarkoba Iptu M Yazid mengutip dari Polres-bontang.com.

Dari hasil pengembangan, tersangka mengaku mendapat sabu dari seorang pria yang merupakan rekannya di Teluk Pandan, Kutai Timur.

"Kami tangkap juga, tersangka residivis kasus yang sama," ujarnya.

Keduanya dijerat pasal 114 ayat 1 Jo pasal 132 ayat 1 atau pasal 112 ayat 1 Jo pasal 132 ayat 1 UU RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Editor: Yusva Alam



HM SYAFRANUDDIN
Kepala Dinas Perpustakaan
& Kearsipan (DPK) Kaltim

RADAR BONTANG

AKTUAL & TERPERCAYA

.COM

KORAN DIGITAL



DINAS PERPUSTAKAAN & KEARSIPAN KALIMANTAN TIMUR

EDISI MINGGU KE 1 - OKTOBER 2023



**PERJALANAN WISATA LITERASI
PELAJARAN DARI
PERPUSTAKAAN CISARUA**



PERJALANAN WISATA LITERASI HARI KEDUA, PELAJARAN DARI PERPUSTAKAAN CISARUA



Mujahadah dan rekannya di pintu gerbang Perpustakaan Kelurahan Cisarua.

PERJALANAN Wisata Literasi di hari kedua, Mujahadah dan rekan-rekannya akan berangkat ke Kota Sukabumi untuk berkunjung ke Perpustakaan Cisarua. Di sana Mujahadah dan tim Perpustakaan dan Kearsipan Daerah (DPKD) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) melakukan studi tiru atau mengambil ilmu keberhasilan perpustakaan tersebut.

Perpustakaan Cisarua dinilai bisa memberikan inspirasi dalam mengelola perpustakaan, karena perpustakaan ini sangat aktif dalam menyelenggarakan pelatihan berbahasa asing dan daerah juga aktif membantu mengembangkan Usaha Kecil Menengah (UKM), bagi masyarakat disekitar Perpustakaan.

"Hari kedua menurut saya sangat menginspirasi karena kami berkunjung ke perpustakaan kelurahan Cisarua, Sukabumi," kata Mujahadah.

Saat tiba ke perpustakaan kelurahan Cisarua di Sukabumi, Mujahadah mengaku langsung

disambut ucapan selamat datang oleh Duta Baca Kota Sukabumi dan pustakawan dari Perpustakaan Cisarua menggunakan berbagai bahasa.

"Kami disambut dengan berbagai macam bahasa, ada bahasa Indonesia, bahasa Sunda, bahasa Mandarin dan bahasa Prancis. Dari situ saja saya sudah sangat kagum dengan kemampuan mereka dalam berbahasa yang sudah ada di tahap internasional," ungkapnya.

Dan ternyata itu adalah cara perpustakaan ini dalam mengenalkan beberapa kegiatan yang rutin dilakukan oleh perpustakaan tersebut.

"Mereka menyediakan pembelajaran secara gratis untuk pengunjung perpustakaan, dari kelas bahasa. Jadi ada banyak bahasa yang mereka ajarkan seperti bahasa Korea, bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Prancis, dan masih banyak lagi," paparnya.

"Tidak hanya itu, tapi mereka juga mengadakan kelas pelati-

han public speaking dan juga pelatihan bagi warga sekitar yang ingin mengembangkan UMKM-nya," tambahnya.

Dia mengaku banyak mendapatkan ilmu-ilmu baru terkait pengelolaan perpustakaan yang selama ini tidak pernah terpikir sebelumnya.

"Dari situ saya sadar bahwa perpustakaan bukan sekedar gudang buku tapi lebih dari itu, perpustakaan menjadi tempat untuk pengembangan sumberdaya manusia. Seperti yang kita tahu negara akan maju apabila sumber daya Manusia nya berkualitas" pungkasnya.

Inilah sedikit cerita yang dibagi oleh Mujahadah dari perjalanannya ke Perpustakaan terbaik di Indonesia.

Usai mendapatkan ilmu dari perpustakaan tersebut Perjalanan wisata Literasi berlanjut berkunjung ke Rumah Baca Ibnu Komar (RBIK). (adv)

Pewarta : Hanafi

Editor : Nicha Ratnasari



Arsiparis Ahli Muda DPKD Kaltim Dewi Susanti MM (nomor 2 dari kiri) bersama tim dari DPKD Kaltim.

KUKAR JADI PERCONTOHAN, SUKSESNYA PENERAPAN APLIKASI SRIKANDI DI KALTIM

SAMARINDA - Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah (DPKD) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) sangat mengapresiasi perjuangan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) atas penerapan aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (Srikandi) sehingga Kukar meraih penghargaan Terbaik 3 Nasional dalam penerapan aplikasi Srikandi tersebut.

Hal ini disampaikan oleh Arsiparis Ahli Muda DPKD Kaltim Dewi Susanti MM saat usai menjadi narasumber pada kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Aplikasi Srikandi level 2 yang digelar oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Kaltim Rabu (27/9/2023) kemarin.

"Tentu ini menjadi apresiasi yang sangat tinggi bagi Kami

DPKD Kaltim, untuk tim binaan kami DPKD Kukar, yang telah mampu membuktikan bahwa Kabupaten yang ada di Kalimantan Timur bisa berprestasi di tingkat nasional dalam penerapan aplikasi Srikandi," ungkapnya.

Pemkab Kukar berhasil menjadi Juara 3 Nasional dalam penerapan aplikasi tersebut karena penerapan aplikasi Srikandi ini dimulai dari Pemerintahan tingkat Desa dan kelurahan di daerahnya.

"Penghargaan ini didapatkan karena Pemkab Kukar berhasil menerapkan pelaksanaan aplikasi Srikandi hingga ke pemerintahan level desa dan kelurahan," ujarnya.

Dia berharap semua kabupaten/ kota yang ada di wilayah Kaltim bisa mengikuti jejak Pemkab Kukar dalam penerapan ap-

likasi Srikandi agar semua urusan pekerjaan berkas dan kearsipan bisa dengan cepat terselesaikan.

"Semoga ini bisa menginspirasi seluruh perangkat daerah provinsi dan perangkat DPKD seluruh kabupaten dan kota yang ada di Kaltim, karena masih banyak yang bisa dijadikan percontohan bagaimana keberhasilan teman-teman di Kukar," pungkasnya.

Sebagai informasi, Aplikasi SRIKANDI merupakan aplikasi umum bidang kearsipan yang dapat mendukung pengelolaan arsip dan tata kelola pemerintahan berbasis elektronik. Hal ini berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). **(ADV)**

Pewarta : Hanafi

Editor : Nicha Ratnasari



1. Kepala Bidang Pengembangan Perpustakaan dan Pembudayaan Kegemaran Membaca (BP3KM) DPKD Kaltim Taufik bersama Staf Ahli Gubernur Kaltim Bidang Reformasi Birokrasi dan Keuangan Daerah, Diddy Rusdiansyah, saat menyerahkan penghargaan kepada para pemenang lomba bertutur tingkat SD/MI tingkat Kaltim 2023.

Pemenang Lomba Bertutur Bakal Dibina DPKD Jadi Pendongeng

SAMARINDA - Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah (DPKD) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) akan membina para pemenang lomba bertutur tingkat SD/MI Se-Kaltim 2023, menjadi seorang pendongeng di Kaltim.

Hal ini dikatakan oleh Kepala Bidang Pengembangan Perpustakaan dan Pembudayaan Kegemaran Membaca (BP3KM) DPKD Kaltim Taufik, bahwa pihaknya akan membina dan mengontrak para pemenang lomba bertutur untuk diajak mendongeng di sekolah-sekolah.

"Selama ini setiap lomba bertutur atau pun mendongeng, biasanya setelah juara stop sampai disana saja. Oleh sebab itu, kali ini kami akan mengontrak mereka untuk menjadi pondengan dari DPKD Kaltim berkeliling ke Sekolah di Kaltim, dengan program Dongkel atau dongeng keliling," ungkapnya.

Taufik juga mengatakan bahwa dengan diajaknya para pemenang lomba bertutur keliling sekolah maka akan memotivasi para siswa-siswi di sekolah lainnya untuk berprestasi.

"Karena dengan program Dongkel atau Dongeng Keliling nanti kita akan ajak para pemenang ini. Tentunya kita jadikan model untuk memotivasi anak yang lain," ujarnya.

Lomba bertutur tingkat SD/MI Se-Kaltim setiap tahun selalu digalakan oleh DPKD Kaltim dalam upaya meningkatkan budaya literasi sejak dini, Taufik berharap dari sini muncul pendongeng - pendongeng handal yang bisa mengharumkan daerah Kaltim kelak.

"Setiap tahun lomba bertutur pastinya telah mencetak 10 pendongeng dari setiap perwakilan Kabupaten/Kota di Kaltim, dan saya berharap semoga mereka bisa menjadi pendongeng Kaltim, kelak" pungkasnya.

Diketahui, lomba bertutur tingkat SD/MI tingkat Kaltim 2023. Sudah selesai digelar dan diberikan penganugrahan di aula Kantor Gubernur Kaltim pada 19 September 2023 lalu, tampil sebagai juara pertama adalah Azza Ashila dari SD YPPSB 1 Sangatta Utara, Kutai Timur. **(adv)**

Pewarta : Hanafi
Editor : Nicha Ratnasari



Dari kiri : Kepala BPSDM Kaltim Dra Nina Dewi MAP dan Arsiparis Ahli Muda DPKD Kaltim Dewi Susanti MM

BPSDM GELAR BIMTEK APLIKASI SRIKANDI, GUNA PERCEPATAN PEMBERKASAN DAN KEARSIPAN

SAMARINDA -Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) menutup pelatihan Bimbingan Teknis (Bimtek) Aplikasi Srikandi bagi Aparat Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kaltim pada Rabu (27/9/23) lalu, di Aula lantai 5 Hotel Fugo Big Mall Samarinda.

Acara ini dihadiri oleh ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Kaltim. Adapun narasumber kegiatan ini berasal dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah (DPKD) Provinsi Kaltim.

Salah seorang Narasumber Bimtek Aplikasi Srikandi, yakni Arsiparis Ahli Muda DPKD Kaltim Dewi Susanti MM mengatakan pentingnya Aplikasi Srikandi ini dalam upaya percepatan pembangunan di Kaltim.

"Lewat aplikasi Srikandi ini

maka urusan surat menyurat dan kearsipan lebih mudah dan cepat jadi tidak ada lagi yang namanya kata-kata pimpinan sedang di luar kota, karena semua langsung terkoneksi di semua HP pegawai, dari tingkat bawah sampai pada pimpinan," ungkapnya.

Dewi juga menjelaskan bahwa melalui aplikasi ini semua data berkas dan arsip akan dijamin keamanan dan kerahasiaannya karena langsung diawasi oleh pihak badan siber negara.

"Jadi keamanannya itu langsung dijaga oleh badan siber negara, dan setiap OPD sudah ada masing-masing Admin nya. Nah admin ini sudah di SK oleh Sekda Provinsi," ungkapnya.

Aplikasi SRIKANDI merupakan aplikasi umum bidang kearsipan yang dapat men-

dukung pengelolaan arsip dan tata kelola pemerintahan berbasis elektronik. Hal ini berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

"Dari Perpres tersebut maka diharapkan pada bulan Desember 2023 ini, karena kita akan menghadapi IKN tahun depan kita targetnya semua OPD sudah mampu menerapkan aplikasi ini," pungkasnya.

Sementara itu Kepala BPSDM Kaltim Dra Nina Dewi MAP dalam sambutannya berharap melalui Bimtek ini, peserta dapat memanfaatkan ilmu dan pengalaman yang didapatkan untuk menerapkannya aplikasi Srikandi ini dengan baik. (adv)

Pewarta : Hanafi

Edisi : Nicha Ratnasari



PERJALANAN WISATA LITERASI HARI PERTAMA, KE PERPUSTAKAAN TERTINGGI DI DUNIA



Mujahadah (tengah) dan kedua temannya yang juga dapat kesempatan hadiah wisata Literasi Ke Perpustnas Jakarta.

MUJAHADAH yang baru saja dianugrahi Juara 1 Video Kreatif Tiktok tingkat Kaltim, Selasa (19/9/2023) lalu, ingin berbagi kisah setelah dirinya diberikan hadiah wisata literasi dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah (DPKD) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim),

Gadis berhijab ini menceritakan saat dirinya berada di Daerah Istimewa Kota Jakarta. Dia bersama teman-temannya yang juga pemenang lomba Video Kreatif Tiktok 2 dan 3 berkesempatan berwisata literasi ke gedung baru Perpustakaan Nasional (Perpusnas) yang berada di Jalan Medan Merdeka Kelurahan Gambir, Jakarta Pusat pada Rabu (20/9/2023) lalu.

"Kami berangkat dari pukul 15.00 Wita tanggal 20 September 2023 dari Samarinda, sampai di Jakarta pukul 16.30 WIB, kemudian kami langsung menuju Perpustnas," ujar mahasiswi Universitas Mulawarman Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan ini.

Sesampainya di Perpustnas, gadis asal Kecamatan Sebulu, Kutai Kartanegara ini disambut oleh pemandu dari Perpustnas yang akan mendampingi mereka untuk menuju gedung baru Perpustnas yang baru diresmikan oleh Presiden Jokowi pada 14 September lalu. Mujahadah pun mengaku terkagum-kagum dengan kemegahan bangunan baru Perpustnas, karena besar dan terdiri dari 24 lantai.

Sebelum masuk ke bangunan perpustakaan tertinggi di dunia ini, Mujahadah melewati semacam pendopo yang difungsikan layaknya museum.

Di sana ada empat ruangan, masing-masing dua di sebelah kanan dan kiri, yang menampilkan riwayat baca bangsa Indonesia.

Ruang Aksara menampilkan peta Indonesia di layar digital di salah satu sisi dindingnya. Layar tersebut dilengkapi dengan suara yang menceritakan kronologis rakyat Indonesia mengenal huruf.

Di sebelah Ruang Aksara, ada ruangan yang menyajikan penjelasan mengenai perkembangan media penulisan serta barang-barang yang menjadi saksi sejarah, seperti media tulis bambu, kayu alim, daun lontar, gebang, dluwang daluwang, kertas Eropa hingga kertas China.

Dan di selasar menuju gedung baru, naskah Nusantara asli dipamerkan dalam kotak-kotak kaca.

Ada Nagarakretagama karya Empu Prapanca yang ahsyur, dan Babad Diponegoro yang ditulis sendiri oleh Pangeran Diponegoro. Keduanya masuk dalam daftar warisan budaya dunia UNESCO.

Di pendopo museum juga ada buku-buku tentang presiden pertama Republik Indonesia Soekarno lengkap dengan foto-fotonya.

"Sebelum menuju gedung baru, kami melewati gedung yang namanya Gedung Trisula, kayak museum, ada berbagai macam aksara tua di sana seperti aksara Jawa dan Sunda. Kami juga diperlihatkan berbagai kertas jaman dahulu, ada alat transportasi seperti sepeda dan replika kapal untuk mengantar naskah melalui laut," ungkap Mujahadah.

Keluar dari pendopo museum, ada ruang terbuka hijau dengan bunga

warna-warni menuju gedung baru. Deretan lukisan Presiden Republik Indonesia, mulai dari Soekarno hingga Joko Widodo menyambut pengunjung yang memasuki gedung.

Di tengah aula lobi utama berdiri rak buku yang menjulang hingga lantai keempat. Di atasnya terdapat langit-langit bergambarkan peta Indonesia.

"Di ujung pintu kita dihadapkan dengan perpustakaan sangat besar gitu 24 lantai perpus terbesar di dunia, dan waduh gede banget, waktu itu lagi kondisi rame-ramenya ada banyak sekolah dan instansi yang berkunjung," katanya.

Naik satu lantai, ada Ruang Layanan Keanggotaan Perpustakaan, tempat pengunjung bisa mendaftar menjadi anggota untuk dapat memanfaatkan fasilitas perpustakaan.

Setelah itu Mujahadah naik langsung kelantai puncak gedung baru tersebut dilantai 24. "Kita langsung disuguhi pemandangan kota Jakarta dari atas. Memang benar sih kata orang nampak berkabut seperti polusi udara, tapi dari atas itu kita masih bisa melihat Monas dan Masjid Istiqlal Jakarta. Gila tinggi banget sih dari atas," tambahnya.

Perjalanan keliling Perpustnas adalah hari pertama wisata literasi Mujahadah dan teman-temannya, setelah asik berkeliling dari perpustnas, mereka beristirahat di Hotel Horison, karena esok hari akan ada petualang lainnya di kota Bogor. (Adv)

Pewarta : Hanafi

Editor : Nicha Ratnasari



Arsiparis Ahli Muda DPKD Kaltim, Dewi Susanti, MM

DESEMBER 2023, SELURUH SKPD DI KALTIM WAJIB IMPLEMENTASIKAN APLIKASI SRIKANDI

SAMARINDA - Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah (DPKD) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) terus giat melakukan sosialisasi tentang penggunaan Aplikasi Srikandi (Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi) sebagai langkah untuk meningkatkan pengarsipan dan administrasi pemerintahan di Kaltim.

"Dalam menghadapi tantangan IKN (Indonesia Kawasan Nusantara) ke depan, pada bulan Desember 2023, targetnya adalah seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), mulai dari tingkat provinsi hingga kabupaten/kota di Kaltim, wajib mengimplementasikan aplikasi Srikandi ini," ujar Dewi Susanti, MM, Arsiparis Ahli Muda DPKD Kaltim.

Penggunaan Aplikasi Srikandi diwajibkan karena berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

"Dengan tahun 2024, pemerintah pusat akan beralih ke IKN,

maka kita harus sudah menerapkan aplikasi ini sebagai bagian dari percepatan administrasi dan pengarsipan. Ini adalah amanah presiden dalam percepatan pengambilan keputusan, yang hanya perlu diakses dan dikerjakan melalui ponsel pintar atau perangkat Android," tambahnya.

Aplikasi Srikandi merupakan hasil kolaborasi antara Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Kementerian Komunikasi dan Informatika, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), dan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), sehingga aspek keamanannya telah dijamin.

"Tentang masalah keamanan, Badan Siber dan Sandi Negara telah menjaminkannya, sehingga tidak sembarang orang dapat mengaksesnya. Setiap pegawai yang telah di SK-kan oleh Sekretariat Daerah (Setda) wajib memiliki akun Srikandi, dan masing-masing akan memiliki kode

sandi dan kata sandi tersendiri," ungkap Dewi.

Dengan implementasi Aplikasi Srikandi oleh seluruh perangkat pemerintahan, banyak manfaat dan percepatan akan terjadi dalam hal administrasi dan pengarsipan. Hal ini memungkinkan akses dari mana saja, bahkan ketika pimpinan berada di luar kota.

"Dengan Aplikasi Srikandi, urusan surat-menyurat dan pengarsipan akan menjadi lebih mudah dan cepat. Tidak akan ada lagi alasan bahwa pimpinan sedang berada di luar kota, karena semua terhubung langsung melalui perangkat seluler pegawai, mulai dari tingkat paling bawah hingga pimpinan," jelasnya.

Dewi juga mengungkapkan bahwa Aplikasi Srikandi telah mencapai versi 2, dan kemungkinan akan terus dikembangkan menjadi Aplikasi Srikandi versi 3.

(Han/ADV)

Pewarta: Hanaf

Editor: Agus Susanto



KABUT ASAP MELANDA BERAU, RATNA: GUNAKAN MASKER SAAT KELUAR RUMAH



**APBD PERUBAHAN BERAU TINGGI,
FRAKSI NASDEM HARAP DIRASAKAN
LANGSUNG OLEH MASYARAKAT**



Suasana kabut asap yang mulai menyelimuti perkotaan Tanjung Redeb.

KABUT ASAP MELANDA BERAU, RATNA: GUNAKAN MASKER SAAT KELUAR RUMAH

TANJUNG REDEB - Munculnya kabut asap akibat kemarau dan karhutla yang terjadi beberapa waktu terakhir kembali menjadi perhatian Anggota Komisi I DPRD Berau, Ratna Kalalembang.

Diketahui, saat ini kabut asap mulai terlihat di wilayah perkotaan, sehingga memicu menurunnya jarak pandang.

Hal itu menimbulkan kekhawatiran akan terganggunya kesehatan masyarakat, terutama terhadap kesehatan pernafasan pada anak-anak dan lanjut usia.

Ratna mengimbau masyarakat untuk lebih peka terhadap kesehatan, dengan cara menggunakan masker saat bepergian ke luar rumah.

"Lebih baik mencegah lebih dulu sebelum mengobati. Tidak ada salahnya kalau menggunakan masker saat bepergian ke luar rumah, apalagi saat ini musim kemarau, selain kabut

asap juga menghindari efek debu akibat kemarau," ujarnya.

Selain penggunaan masker, dirinya juga memberi saran untuk menggunakan pelindung tubuh lainnya saat bepergian ke luar rumah, untuk menghindari efek negatif dari suhu panas yang melanda Kabupaten Berau.

Tidak hanya mengimbau penggunaan masker saat bepergian ke luar rumah, Politikus Golkar ini juga berharap kabut asap yang menyelimuti langit Kabupaten Berau bisa segera menghilang melalui penanggulangan karhutla yang terus dilakukan pihak terkait.

"Dampak dari kabut asap dan suhu panas saat ini bisa mempengaruhi kondisi kesehatan, kalau bisa kurangi aktivitas di luar rumah jika tidak terlalu penting. Semoga kabut asap ini segera menghilang sepenuhnya," tandasnya. (adv/dez)



Anggota Komisi II DPRD Berau, Darlena.

APBD PERUBAHAN BERAU TINGGI, FRAKSI NASDEM HARAP DIRASAKAN LANGSUNG OLEH MASYARAKAT

TANJUNG REDEB - Bonus kenaikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Berau tahun 2023 diharapkan Fraksi NasDem dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal itu diungkapkan Anggota Komisi II DPRD Berau, Darlena.

Ia mengatakan, dengan besarnya APBD perubahan Berau tahun 2023, pembangunan harus difokuskan kepada peningkatan infrastruktur di kampung-kampung yang ada, tentu harus dirasakan langsung oleh masyarakat.

"Pemkab jangan terlalu terpusat pada pembangunan infrastruktur yang belum bisa dirasakan langsung oleh masyarakat, fokuslah pada apa yang bisa dirasakan dan dinikmati oleh masyarakat luas," ujarnya.

Darlina menegaskan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau harus lebih

memperhatikan apa yang menjadi aspirasi masyarakat. Baik itu di tingkat kampung, kelurahan maupun kecamatan.

"Karena apa yang menjadi aspirasi mereka, tentu itu apa yang sangat dibutuhkan. Maka dari itu, harus benar-benar diperhatikan atau diprioritaskan," katanya.

Dirinya menyebut, fraksi NasDem menyetujui Raperda tentang Perubahan APBD Berau tahun 2023 untuk disahkan menjadi Perda Berau tahun 2023. Namun ada catatan yang diberikan pihaknya mengenai hal tersebut.

"Semoga apa yang kami suarkan ini dapat didengar dan ditindaklanjuti oleh Pemkab Berau, kami berharap pembangunan di Kabupaten Berau melalui APBD dapat berjalan maksimal sesuai dengan apa yang diinginkan seluruh masyarakat," pungkasnya. **(adv/dez)**



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BERAU



Sekretaris Komisi III DPRD Berau, Ichsán Rapi.

ICHSAN RAPI DORONG PENUNTASAN JALAN FREEWAY

TANJUNG REDEB - Pembangunan jalan bebas hambatan atau freeway yang dibangun sejak 2014 lalu hingga saat ini belum tuntas. Hal itu disorot Sekretaris Komisi III DPRD Berau, Ichsán Rapi.

Dia menerangkan, jika freeway itu telah tuntas, maka akan menghubungkan Bandara Kalimantan hingga ke kawasan Singkuang. "Tentu ini sangat bermanfaat untuk pengembangan ekonomi dan pemecah arus lalu lintas di perkotaan," katanya.

Rencananya, jika jalur tanpa hambatan tersebut telah selesai, maka akan terhubung hingga ke wilayah Mantaritip, Kampung Pijanau dan Sambaliung.

"Kalau Jembatan Kelay III terealisasi, maka akan menjadi penghubung Singkuang dan Limunjan. Jadi nanti itu jalannya hanya melintasi pinggiran kota, jadi tingkat kepadatan

kendaraan tidak terpusat ke perkotaan," jelasnya.

Selain itu, kata Ichsán, dengan adanya pembangunan jalan tersebut nantinya kendaraan bermuatan besar seperti truk sawit dan sebagainya tidak lagi di diperbolehkan melintas di pusat kota.

"Tidak ada lagi mobil-mobil besar yang melintas. Khususnya di pusat Tanjung Redeb," tegasnya.

Politikus Gerindra ini berharap, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) segera melanjutkan proyek yang sempat tertunda tersebut. Untuk itu, perlu adanya sinergitas bersama masyarakat untuk melakukan pembebasan lahan. Guna, memperlancar pengerjaan ke depannya.

"Pemkab harus segera membebaskan lahan yang akan digunakan. Jangan sampai juga masyarakat mematok harga mahal untuk pembebasan lahan," tandasnya. **(adv/dez)**



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BERAU**



Ketua DPRD Berau, Madri Pani.

CARI SOLUSI TEKAN SILPA, MADRI PANI MINTA ADA RAPAT EVALUASI

TANJUNG REDEB - Ketua DPRD Berau, Madri Pani mendorong seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk melakukan pembenahan soal pengelolaan keuangan.

Dia menuturkan, saat ini masih banyak kinerja OPD yang perlu dievaluasi, salah satunya dalam mengelola keuangan daerah. "Karena kami sebagai pusat kontrol, maka perlu evaluasi mengenai permasalahan yang sedang terjadi," katanya.

Dirinya menilai, evaluasi seluruh OPD menjadi suatu upaya untuk meningkatkan kinerja yang lebih baik ke depannya. Dicontohkannya seperti masih tingginya sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) yang terjadi tiap tahun.

"Hal itu yang dievaluasi, perlu adanya duduk bersama, karena ini harus dicari tahu apa penyebabnya karena terjadi di setiap tahun," tegasnya.

Madri menjelaskan, SiLPA merupakan indikator yang perlu dilakukan evaluasi secara rutin dan dalam tempo cepat. Hal itu, kata dia, agar mengetahui apa yang menjadi penghambat OPD.

"Eksekutif dan kami di legislatif seha-

rusnya ada rapat koordinasi bupati, wakil bupati, sekkab dan OPD terkait sebulan sekali, atau tiga bulan," jelasnya.

Politikus Nasional Demokrat (NasDem) ini menerangkan, jika ada rapat evaluasi yang dilakukan secara rutin, maka tidak ada alasan untuk tak bisa menyelenggarakan pengelolaan keuangan daerah.

"Terkecuali masalah teknis, hal ini juga saya dorong karena sering menerima keluhan mengenai kurangnya anggaran di OPD. Tetapi pada saat diberikan, justru kadang tidak terserap maksimal," bebarnya.

"Apakah ini soal birokrasi belum tertata dengan tepat dan benar, apakah karena banyak kekosongan jabatan, pengambil kebijakan," tambahnya.

Kendati demikian, Madri Pani mengingatkan bahwa bentuk perhatian legislatif terhadap eksekutif adalah dengan menjalankan fungsi pengawasannya. Salah satunya mengingatkan masalah SiLPA.

"Harus bersama mencarinya. Jadi sekali lagi ini bukan untuk menyudutkan eksekutif, sama-sama menjalankan peran untuk kepentingan masyarakat," tutupnya. **(adv/dez)**



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BERAU



Ketua DPRD Berau, Madri Pani.

MADRI: JANGAN HANYA GENCARKAN PEMBANGUNAN FISIK, TINGKATKAN JUGA SDM

TANJUNG REDEB - Ketua DPRD Berau, Madri Pani mengingatkan agar pembangunan jangan hanya berupa fisik dan sarpras, tapi juga harus meningkatkan sumber daya manusia (SDM).

Dirinya memberikan beberapa catatan penting untuk jajaran eksekutif, yakni tidak hanya dari sektor pariwisata dan pembangunan saja yang harus menjadi progres utama, tetapi perlu juga memperhatikan penurunan angka kemiskinan, mengurangi pengangguran, stunting dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).

"Seharusnya, jangan hanya dari sektor pariwisata dan pembangunan saja yang harus menjadi progres utama. Tetapi, perlu ada juga perhatian

terhadap penurunan angka kemiskinan, mengurangi pengangguran, stunting dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)," kata Madri Pani.

Dia tak mempermasalahkan jika Pemkab Berau mengencarkan pembangunan fisik dan sarpras. Namun jangan sampai mengesampingkan poin penting yang harus ditingkatkan, yakni SDM-nya.

Dia berharap, pada perayaan hari jadi Berau dan Tanjung Redeb pada tahun ini dapat memberikan suatu inovasi, gebrakan atau perubahan yang luar biasa bagi Berau.

"Ini agar bisa membangkitkan ekonomi masyarakat dari bawah hingga ke atas," tandasnya. (adv/set)



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BERAU**



Anggota Komisi I DPRD Berau, Faletinus Keo Meo.

MARAK KASUS PELECEHAN DI BERAU, FALENTINUS: ANTISIPASI SEDINI MUNGKIN

TANJUNG REDEB – Masih maraknya kasus mengenai perlindungan perempuan dan anak di Kabupaten Berau menjadi hal yang harus diperhatikan secara khusus. Terlebih tak sedikit pelaku adalah orang terdekat korban.

Menanggapi persoalan tersebut, Anggota Komisi I DPRD Berau, Faletinus Keo Meo mengatakan, kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak harus dicegah dari akarnya. Jika tidak, para pelaku akan terus melakukan tindakan yang dapat merusak mental bahkan fisik korban.

“Harus diantisipasi sedini mungkin. Apalagi jika korban masih berstatus dibawah umur, tentu akan merusak mentalnya. Ini harus diperhatikan,” tuturnya.

Dirinya menyebut, jika pelaku merupakan orang terdekat tentu suatu hal yang sangat disayangkan. Sebab, dinilai Falen, seharusnya mereka memberikan perlindungan dan rasa aman terhadap korban.

“Tentu justru akan membuat korban trauma. Sebab, orang terdekat malah menjadi pelaku kekerasan. Saya harap ada tindakan tegas terhadap pelaku,” imbuhnya.

Politikus Demokrat ini mendorong Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait untuk memberi bimbingan yang maksimal untuk membangun kembali mental para korban kekerasan.

“Karena korban ini juga merupakan generasi yang memiliki potensi memajukan Berau ke depannya. Maka dari itu, kita harus cepat tanggap terkait hal seperti ini,” tegasnya.

Faletinus berharap agar sosialisasi terkait perlindungan anak dan perempuan digencarkan dengan maksimal oleh OPD terkait. Ditegaskannya harus tepat sasaran.

“Kita ingin kasus perlindungan perempuan dan anak dapat minim bahkan nihil. Kita bersama pemkab berkolaborasi dalam hal sosialisasi agar hal-hal semacam ini bisa ditekan,” pungkasnya. **(adv/set)**



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BERAU



Kondisi Pasar Sanggam Adji Dilayas disorot DPRD Berau.

PERNAH JADI PASAR TRADISIONAL TERBAIK, SYARIFATUL: HARUS DIRAIH KEMBALI

TANJUNG REDEB - Pasar Sanggam Adji Dilayas (PSAD) yang berada di Kelurahan Rinding, Kecamatan Teluk Bayur dibangun pada 2009 lalu dan pernah dinobatkan sebagai pasar tradisional terbaik di Indonesia, kini kondisi pasar tersebut justru membuat publik prihatin.

Menanggapi persoalan itu, Wakil ketua I DPRD Berau, Syarifatul Syadiyah mengaku sangat prihatin dengan keadaan pasar terbesar yang ada di Bumi Batiwakkal tersebut karena sudah tidak seperti dulu lagi.

"Saya lihat sekarang ini Pasar SAD sudah tidak tertata, serta infrastrukturnya juga sudah tidak bagus lagi," ungkapnya.

Selain itu, Syarifatul juga sangat menyanggah Pasar SAD yang beberapa kali mencatatkan prestasi di tingkat nasional,

namun beberapa tahun terakhir tidak ada pencapaian yang diraih.

"Sayang sekali, karena beberapa kali pasar kita itu dapat prestasi. Tetapi sekarang sudah tidak lagi. Dulu kita mempertahankan penghargaan beberapa tahun berturut-turut, seharusnya kita lebih meningkatkannya lagi," ucapnya.

Oleh sebab itu, dirinya mendorong kepada pengelola Pasar SAD untuk lebih memperhatikan kondisi dan fasilitas yang butuh perbaikan atau belum terpenuhi. Agar, dapat memberi kenyamanan kepada pedagang maupun pembeli.

"Dengan kerja keras dan kerja sama yang baik dengan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, pasti penghargaan yang pernah diraih dapat kita capai kembali," tandasnya. (adv/set)



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BERAU**



Anggota Komisi I DPRD Berau, Rudi Parasian Mangunsong.

RUDI DESAK PEMKAB BERAU KOORDINASI KE PEMPROV KALTIM UNTUK ATASI KEKURANGAN SMA

TANJUNG REDEB – Jumlah Sekolah Menengah Atas (SMA) di Kabupaten Berau dianggap masih kurang. Terlebih tidak ada data pasti mengenai berapa pelajar SMP yang lulus dalam setiap tahunnya.

Anggota Komisi I DPRD Berau, Rudi Parasian Mangunsong menegaskan, jangan sampai ada kejadian yang merugikan pelajar SMP yang hendak melanjutkan pendidikannya ke jenjang SMA.

“Apalagi pernah ada kejadian satu sekolah tidak dapat menampung pelajar, padahal masih dalam zonasi. Jangan sampai pelajar kita harus putus sekolah, karena keterbatasan ruang belajar, dan sekolah,” ungkapnya.

Dia membeberkan, Kecamatan Segah sudah meminta bantuan sekolah jenjang SMA. Namun, hingga kini belum ada terealisasi. Diketahui, tingkat SMA merupakan kewenangan dari provinsi. Tapi menurut Rudi,

pemerintah dapat menjemput bola dan memaksa agar dibanangkan sekolah.

“Apalagi di Kecamatan Segah, jumlah anak-anak banyak. Tapi harus jauh ke kota untuk bisa bersekolah,” katanya.

Politikus PDI-P ini menyebut, pemerintah jangan pasrah karena kebijakan ada di provinsi. Padahal, kata dia, Pemkab Berau bisa saja mendesak provinsi untuk membangun SMA di Kecamatan Segah, terlebih hal tersebut merupakan suatu kebutuhan mendasar.

“Bagaimana bisa berjalan suatu daerah, jika SDM nya kurang pendidikan,” tuturnya.

Rudi meminta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait untuk dapat memberikan data jumlah lulusan setiap tahunnya. Tujuannya agar bisa menjadi bahan pertimbangan dari provinsi dalam membangun sekolah baru.

“Paling jangka setahun membangun sekolah itu. Anggaran

juga ada di provinsi,” tambahnya.

Dirinya mengaku, nyaris setiap tahun mendengar adanya ruang belajar dan sekolah yang kurang. Namun tidak ada tindakan dari pemerintah. Untuk SMP dan SD menurutnya sudah cukup banyak, namun untuk tingkat lanjutan masih kurang.

“Di wilayah perkotaan Tanjung Redeb memang banyak. Tapi bagaimana kabar yang ada di kecamatan lainnya,” katanya.

Kendati begitu, Rudi menganggap tidak semua orangtua mampu menyekolahkan anaknya jauh. Memang untuk negeri semua gratis. Namun untuk kebutuhan sehari-hari dan juga biaya indeks, tentu membutuhkan rupiah.

“Jangan menganggap semua orangtua mampu. Kita harus berpikir juga, jadi lebih baik membangun sekolah. Saya tidak ingin penerus bangsa ini putus sekolah dan akhirnya menikah muda,” pungkasnya. (adv/set)



Anggota Komisi II DPRD Berau, Yusuf.

YUSUF: PEMERINTAH HARUS FOKUS TUNTASKAN ODF

TANJUNG REDEB – Masih banyaknya kampung yang tersandung persoalan Open Defecation Free (ODF) disoroti Anggota Komisi II DPRD Berau, Yusuf.

Dia mengatakan, untuk di Daerah Pemilihan (Dapil)-nya, ada tiga kampung yang belum bebas ODF. Yakni Maluang, Sambakungan dan Samburakat. "Hal itu karena banyaknya pemukiman warga di bantaran sungai," terangnya.

Menurutnya, hal tersebut harus mendapatkan perhatian serius pemerintah. Sebab, berkaitan erat dengan perilaku hidup sehat masyarakat.

"Jadi kita khawatir terhadap kesehatan masyarakat. Saya harap ada tindak lanjut dari pemerintah mengenai persoalan ini," tuturnya.

Yusuf memaparkan, ada beberapa pihak terkait untuk menangani ODF itu. Yakni Dinas Kesehatan, Puskesmas, dan lainnya.

"Beberapa instansi terkait itu harus saling

bahu-membahu untuk menuntaskan permasalahan ODF ini," imbuhnya.

Dirinya yang juga duduk di bagian anggaran DPRD mengaku akan memberikan support kepada instansi terkait, jika memang masih membutuhkan anggaran, agar permasalahan ini dapat tuntas.

"Karena ini juga sangat penting untuk keberlangsungan masyarakat yang ingin hidup sehat dan mandiri. ODF merupakan salah satu target terpenting untuk memutus mata rantai transmisi penyakit menular," bebernya.

Kendati demikian, dirinya menyebut bahwa Instansi teknis lebih mengetahui persoalan dampak dari ODF di masyarakat, artinya sesegera mungkin dapat dituntaskan.

"Semua pihak harus terlibat, agar dapat merubah perilaku masyarakat melalui penerapan hidup bersih dan sehat," tandasnya. (adv/set)



Wakil Ketua I DPRD Berau, Syarifatul Syadiah.

SYARIFATUL: PERHATIKAN DUA KESULTANAN YANG ADA UNTUK KESEJAHTERAANNYA

TANJUNG REDEB - Kabupaten Berau memiliki dua kesultanan, yakni Kesultanan Gunung Tabur dan Kesultanan Sambaliung. Legislatif pun mendorong pemerintah untuk memperhatikan keduanya agar kesejahteraan tetap terjaga.

Wakil Ketua I DPRD Berau, Syarifatul Syadiah mengatakan, dua kesultanan tersebut hingga kini menjadi kebudayaan yang melekat bagi Kabupaten Berau. Sehingga Pemkab Berau harus senantiasa memberikan dukungan berupa kesejahteraan.

"Contohnya, memberikan insentif khusus bagi penunjang operasional dan kehidupan keduanya," ucapnya.

Selain itu, Syarifatul memberikan apresiasi kepada Pemkab Berau yang telah meningkatkan sarana dan prasarana (Sarpras) den-

gan dibangunnya gapura di Keraton Sambaliung.

Dirinya menyarankan, selain gapura yang ditingkatkan. Drainase perlu sedikit ditinggikan agar ketika hujan turun tidak mengalami banjir.

"Kondisi di dalam museum juga perlu dipertahankan, seperti tangga, atap, dan lantai yang mungkin kelihatan tidak layak harus segera dilakukan renovasi dengan tidak mengubah bentuk aslinya," harapnya.

Dikarenakan Keraton Sambaliung ini sebagai ikon Berau. Maka disebutnya sangat tidak diperkenankan apabila terdapat perubahan wujud baru dari yang asli.

"Jadi keasliannya tetap terjaga, maka jangan ada perubahan wujud dari yang asli," tandasnya. (adv/dez)

KORAN **DIGITAL**

radar.
MEDIA

RADAR BALIKPAPAN

EDISI RABU
4 OKT 2023

AKTUAL & TERPERCAYA

.COM



MALAM MENCEKAM DI BALIKPAPAN, SI JAGO MERAH MEMBAKAR RUMAH WARGA DI KALURAHAN DAMAI



**TIM SAR GABUNGAN BERHASIL
EVAKUASI JENAZAH TERAPUNG DI
LAUT BALIKPAPAN**



Kebakaran yang terjadi di RT 4 Kelurahan Damai, Balikpapan Kota pada Rabu (4/10) sekitar pukul 00.45 WITA.

MALAM MENCEKAM DI BALIKPAPAN, SI JAGO MERAH MEMBAKAR RUMAH WARGA DI KALURAHAN DAMAI

BALIKPAPAN - Musibah kebakaran terjadi di Kota Balikpapan, tepatnya di kawasan Jalan MT Haryono RT 4 Kelurahan Damai, Balikpapan Kota pada Rabu (4/10/2023) sekitar pukul 00.45 WITA.

Mulyadi (43), warga setempat, mengatakan bahwa dia mengetahui adanya kebakaran itu setelah mendengar teriakan sejumlah warga dari belakang rumahnya.

"Saya pas mau tidur, tiba-tiba denger orang-orang itu teriak. Jam 12-an lewat itu," ujarnya.

Api hanya berjarak dua rumah dari tempat tinggalnya, sehingga Mulyadi langsung membangunkan anak dan istrinya serta menyelamatkan sejumlah barang berharga.

"Langsung anak istri dulu yang saya selamatkan. Itu bangunan disamping punya saya, baru saya renovasi kena sedikit," jelasnya.

Petugas pemadam sempat mengalami kendala, hal ini karena kesulitan menuju titik api, mengingat lokasi rumah yang tepat berada di tengah pemukiman yang padat dan menanjak.

Kepala UPT BPBD wilayah Timur, Ridwan, mengatakan bahwa medan yang menanjak serta akses jalan yang sempit menjadikan petugas harus berusaha mencari jalan lain

dan memutar.

"Kondisi cukup sulit, karena tadinya di belakang sini agak naik, menyulitkan petugas untuk bisa ke TKP," ujar Ridwan.

Dari kawasan itu, petugas hanya bisa sampai di parkir rumah makan, kemudian membentangkan selang melewati tanah urukan sekitar satu meter.

"Kemudian jalan yang ada, di samping Hotel Zurich yang tembus Gang Mufakat, itu nggak bisa dilewati kendaraan besar, cuma bisa kendaraan kecil, itupun nggak bisa sampe masuk jauh ke dalam," jelasnya.

Api baru bisa dikuasai satu jam kemudian setelah hampir seluruh unit yang dibantu oleh SAR Brimob dengan watercanonnya dikerahkan untuk menuju ke titik api.

"Untuk laporan awal kami kurang tahu persis sebab setelah laporan masuk langsung menuju ke TKP, dan kami bisa kuasai keadaan sekitar pukul 01.30 WITA," tambah Ridwan.

Hingga api berhasil dipadamkan, belum ada informasi resmi mengenai total rumah yang terbakar, namun berdasarkan pantauan media ini, terdapat tiga rumah yang terbakar. (Bom)

Penulis: Aprianto

Editor: Agus Susanto



Harga beras yang meroket menjadi salah satu penyebab inflasi di Kota Balikpapan pada bulan September 2023.

DAMPAK HARGA BERAS DAN KONDISI CUACA, INFLASI KOTA BALIKPAPAN NAIK

BALIKPAPAN - Berdasarkan data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pada bulan September 2023, Kota Balikpapan mengalami inflasi sebesar 0,02 persen. Angka ini lebih tinggi dibandingkan dengan bulan Agustus 2023 yang mengalami deflasi sebesar -0,16 persen. Secara tahunan, inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) di Kota Balikpapan mencapai 2,96 persen, melebihi angka inflasi nasional sebesar 2,28 persen, tetapi lebih rendah daripada inflasi rata-rata dua kota di Provinsi Kalimantan Timur yang mencapai 3,07 persen. Inflasi tahun kalender hingga saat ini di Kota Balikpapan adalah 2,62 persen.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Balikpapan, R. Bambang Setyo Pambudi, menjelaskan bahwa beberapa komoditas berkontribusi terhadap inflasi pada bulan September 2023. Salah satunya adalah kenaikan harga beras, yang disebabkan oleh penurunan produksi di daerah penghasil beras akibat fenomena El Nino. Selain itu, kenaikan harga gabah kering panen (GKP) dan gabah kering giling (GKG) di tingkat petani juga turut memengaruhi inflasi.

"Harga beras yang mengalami kenaikan di pasar internasional juga mempengaruhi harga beras di dalam negeri. Selain itu, kenaikan harga ikan layang atau

ikan benggol terjadi karena pasokan menurun akibat gelombang tinggi di laut," ungkapnya pada Selasa (3/10/2023).

Bambang Setyo juga mencatat bahwa kenaikan harga jagung manis dan kacang panjang terjadi karena hasil panen yang tidak maksimal akibat cuaca yang tidak mendukung dan permintaan yang tinggi dari masyarakat. Penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) non-subsidi yang efektif mulai berlaku pada bulan September juga ikut memberikan tekanan inflasi.

"Di sisi lain, beberapa komoditas mampu mengendalikan laju inflasi. Deflasi terjadi pada biaya transportasi udara akibat penurunan aktivitas di bandara setelah libur sekolah dan musim panas yang tinggi," jelasnya.

Deflasi juga terjadi pada beberapa komoditas pangan seperti cabai rawit, kangkung, dan bawang merah, berkat pasokan yang lancar dari daerah produsen. Selain itu, harga daging ayam ras juga turun karena permintaan masyarakat menurun sementara pasokan meningkat.

"Ke depan, masih ada beberapa faktor yang diperkirakan akan terus memberikan tekanan inflasi, seperti dampak fenomena El Nino yang dapat menyebabkan gagal panen pada beberapa komoditas pangan utama di daerah produsen," tambah Bambang.

Selain itu, penyesuaian harga BBM non-subsidi yang berlaku sejak September 2023 masih akan berdampak pada inflasi. Peningkatan aktivitas pemerintah dan pariwisata yang berkaitan dengan perkembangan proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) juga dianggap sebagai salah satu penyebab inflasi di Kota Balikpapan.

Bank Indonesia, bekerja sama dengan Pemerintah Daerah melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kota Balikpapan, terus berkolaborasi dalam menjaga ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi. Upaya ini mencakup pelaksanaan bazaar murah dan operasi pasar oleh TPID, kerja sama dengan Bulog untuk program bantuan pangan nasional periode September–November 2023, pemantauan harga di pasar, penanaman cabai bersama dengan Kodim Balikpapan, Paser, dan Penajam Paser Utara, serta penguatan kapasitas TPID melalui program capacity building dan rapat koordinasi rutin.

"Bank Indonesia akan terus berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk menjaga tingkat inflasi agar tetap berada dalam target nasional sekitar 3 persen atau kurang dari 1 persen," pungkas Bambang. (Bom)

Penulis: Aprianto
Editor: Agus Susanto



Tim SAR gabungan saat mengevakuasi jasad pria yang mengapung di perairan Balikpapan.

TIM SAR GABUNGAN BERHASIL EVAKUASI JENAZAH TERAPUNG DI LAUT BALIKPAPAN

BALIKPAPAN - Tim SAR gabungan berhasil melakukan evakuasi terhadap jenazah dengan jenis kelamin laki-laki dari laut Balikpapan tepatnya sekitar 7 mil atau setara 11 kilometer dari bibir pantai pada Selasa (3/10/2023) sekitar pukul 16.30 Wita.

Plt Kepala Pelaksana BPBD Balikpapan, Usman Ali mengatakan, tim SAR gabungan menggunakan satu unit speedboat untuk mempercepat waktu evakuasi. Personel SAR gabungan yang terlibat dalam operasi evakuasi jenazah ini terdiri dari 3 orang Basarnas Balikpapan, 2 orang dari BPBD Balikpapan, dan 1 orang dari Inafis Polresta Balikpapan.

"Kalau kondisi kelihatannya sudah meninggal karena terapung-apung, jadi kita koordinasi dengan Basarnas, TNI-Polri, dengan rekan rekan yang lain bahwa kita akan ambil jenazah tersebut," ujarnya.

Usman menjelaskan, hingga saat ini belum diketahui pasti identitas korban yang telah di evakuasi tersebut. Pasalnya, dari jasad tersebut tidak ditemukan identitas atau tanda pengenal lainnya.

"Kita belum tahu identitas korban," tambahnya.

Seperti diketahui, tim SAR mendapatkan informasi dari salah satu kapal pandu. Dalam laporan tersebut dinyatakan jika telah terlihat jasad pria tengah terapung di laut.

"Kita dapat informasi sekitar pukul 15.00 Wita. Kemudian kita bergerak ke lokasi yang dimaksud untuk melakukan evakuasi jasad tersebut. Dan telah berhasil dibawa ke Rumah Sakit Bhayangkari Balikpapan," ujar salah seorang Rescuer Basarnas Balikpapan, Heri.

Penulis: Aprianto

Editor: Nicha Ratnasari



Jasad MR yang tergeletak di jalan raya.

HAJAR BELAKANG TRUK PARKIR, MAHASISWA BALIKPAPAN TEWAS DI TEMPAT

BALIKPAPAN - Seorang mahasiswa salah satu universitas di Balikpapan berinisial MR (21) tewas ditempat setelah menabrak truk yang terparkir di Jalan Soekarno-Hatta Km 11, Karang Joang, Balikpapan, Senin (2/10/2023) malam.

Kasat Lantas Polresta Balikpapan, Komipol Ropiyani mengatakan, korban mengendarai sepeda motor Yamaha Lexy KT 3800 UL datang dari arah Karang Joang menuju Batu Ampar.

"Ketika melintas di KM 11, terdapat kendaraan roda enam jenis Hino KT 8596 KD yang sedang parkir," ujarnya, Selasa (3/10/2023).

Lanjut Ropiyani, MR menabrak bagian belakang truk yang terparkir di kiri badan jalan tersebut, korban terjatuh dan mengalami luka berat hingga meninggal dunia di tempat. Terlihat korban tergeletak hing-

ga ke median jalan, darah segar mengucur dari kepala korban yang ditutupi oleh pasir.

"Korban dievakuasi ke Rumah Sakit Umum Daerah Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan," jelasnya.

Berdasarkan hasil penyelidikan di TKP dan keterangan dari saksi, Ropiyani menambahkan, pengemudi truk Hino parkir tidak sesuai ketentuan keselamatan.

Akibat kejadian ini, pihak kepolisian berupaya meningkatkan sosialisasi keselamatan berkendara, serta meningkatkan giat patroli di sekitar tempat kejadian.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, di kawasan tersebut memang sering menjadi tempat parkir truk. Mulai dari Km 5 - Km 19 ramai kendaraan parkir dan cukup lama.

Penulis: Aprianto

Editor: Nicha Ratnasari



Pelaku jambret SE saat digiring petugas ke sel tahanan.

BARU BEBAS, RESIDIVIS JAMBRET KEMBALI BERULAH DI BALIKPAPAN UTARA

BALIKPAPAN - Polsek Balikpapan Utara berhasil menangkap seorang pelaku jambret yang beraksi di kawasan Jalan Indrakila, Balikpapan Utara pada 20 September 2023 lalu.

Pelaku diketahui berinisial SE (28) warga Batu Ampar, Balikpapan Utara yang juga merupakan seorang residivis kasus penjambretan dan baru bebas pada 17 Agustus 2023 lalu.

Kapolsek Balikpapan Utara, AKP Bitab Riyani mengatakan, bahwa pelaku telah membututi korbannya yang seorang ibu-ibu dari pertigaan Jalan Indrakila dan Jalan Soekarno Hatta. Hingga akhirnya, tas korban langsung dijambretnya saat hendak parkir kendaraan di salah satu mini market.

"Kejadiannya sore sekitar pukul 16.00 Wita. Pelaku ini sudah mengikuti korban dari jauh. Dan saat korban mau ke mini market dan parkir pelaku yang bawa sepeda motor ini langsung merampas, menjambret tas korbannya," ujarnya Selasa (3/10/2023).

Lebih lanjut Bitab Riyani menjelaskan, berbekal laporan korban tim Opsnal Polsek Balikpapan Utara pun melakukan penyelidikan dan mencari sejumlah rekaman CCTV di lokasi kejadian.

"Setelah 7 hari kita lakukan penyelidikan didapat pelaku ini warga Batu Ampar. Dan kita

tangkap di rumahnya tanpa perlawanan beserta sejumlah barang buktinya," jelasnya.

Adapun sejumlah barang bukti yang didapat berupa sepeda motor pelaku yang digunakan dalam aksi jambret. Tas korban, laptop, dua unit HP dan sisa uang korban.

"Korban mengaku barang-barang yang hilang itu sesuai sama yang ada pada pelaku. Hanya saja uang tunai korban sebesar Rp 7 juta sudah habis digunakan pelaku," tambahnya.

Sementara itu pelaku mengaku terpaksa melancarkan aksi kejahatannya itu lantaran belum memiliki pekerjaan. "Belum ada kerja makanya nekat aja," ujar SE.

SE pun mengaku telah mengincar korban dari jarak yang cukup jauh, karena saat itu ia melihat korbannya memiliki HP dan laptop di dalam tasnya.

"Di sempat setop terima telpon. Habis itu pas masukin HP saya lihat ada laptop juga. Makanya saya ambil satu tasnya," jelasnya.

Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku pun terancam dengan pasal 365 KUH Pidana dimana ancaman kurungan penjaranya hingga 7 tahun.

Penulis: Aprianto
Editor: Nicha Ratnasari



KIDECO RAIH PENGHARGAAN BERGENGSI SUBROTO 2023



**PASER UNITED, KLUB SEPAK BOLA
PENDATANG BARU DARI BUMI DAYA
TAKA DI LIGA 3**



PT Kideco Jaya Agung dianugerahi penghargaan Subroto 2023.

KIDECO RAIH PENGHARGAAN BERGENSI SUBROTO 2023

PASER - Inovasi penyediaan, pembangunan dan pengelolaan fasilitas pembibitan atau persemaian (Nursery) pada kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara, antarkan PT Kideco Jaya Agung (Kideco) anak perusahaan energi terintegrasi PT Indika Energy Tbk meraih penganugerahan penghargaan Subroto 2023.

Penghargaan bergengsi ini diberikan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) di Kempinski Grand Ballroom Jakarta, 29 September 2023 lalu. Acara itu puncak rangkaian kegiatan Hari Jadi Pertambangan dan Energi ke-78 yang mengusung tema "Energi Masa Depan Bumi".

Plt Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM, Bambang Suswanto menyerahkan langsung dan diterima Direktur PT Kideco Jaya Agung, M Kurnia Ariawan. Menteri ESDM Arifin Tasrif mengatakan penghargaan Subroto merupakan apresiasi tertinggi kepada para pemangku kepentingan.

"Di mana telah melakukan kinerja terbaik dalam memajukan sektor energi dan sumber daya mineral di Indonesia dalam kurun waktu satu tahun terakhir," kata Arifin Tasrif.

Ia menambahkan situasi energi di Indonesia sangat dipengaruhi dinamika global antara lain konflik geopolitik dan kondisi perubahan iklim akibat pemanasan global. "Pelaksanaan transisi energi semakin penting dan perlu dipercepat untuk mencapai target net zero emission pada 2060," sebutnya.

Di tempat yang sama, Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Dadan Kusdiana menyebutkan penghargaan Subroto tahun ini diber-

ikan kepada 62 pemenang dari 14 bidang penghargaan yang diusulkan oleh delapan unit eselon satu di lingkungan Kementerian ESDM.

Jumlah bidang penghargaan ini meningkat dari tahun lalu yang sebanyak 13 bidang penghargaan untuk 66 pemenang. "Hal ini memberikan kesempatan lebih untuk penggiat sektor energi untuk terus memberikan kontribusi nyata dalam mengembangkan dan memajukan sektor ESDM kedepannya," tutur Dadan.

Sementara M Kurnia Ariawan menghaturkan terima kasih atas penghargaan yang diberikan oleh Kementerian ESDM. Katanya, anugerah itu menjadi semangat baru dan tanggung jawab untuk terus meningkatkan kinerja pengelolaan lingkungan hidup di dalam kegiatan operasional bisnis PT Kideco Jaya Agung.

"Terima kasih atas penghargaan yang diberikan kepada kami. Kideco mengedepankan keberlanjutan bisnis dan terus memberikan dampak positif secara nyata kepada masyarakat dan lingkungan melalui program-program ESG (Environmental, Social, Governance) yang telah ditetapkan," terang Kurnia.

Diketahui penganugerahan penghargaan Subroto tahun ini kembali digelar untuk keenam kalinya sejak tahun 2017. Dalam acara itu juga hadir Kepala Teknik Tambang Kideco, Ikhsan Alman Latif, sebagai penanggungjawab dalam implementasi program lingkungan perusahaan yang berhasil meraih penghargaan Subroto 2023.

Pewarta : Bhakti Sihombing

Editor : Nicha Ratnasari



Logo Paser United

PASER UNITED, KLUB SEPAK BOLA PENDATANG BARU DARI BUMI DAYA TAKA DI LIGA 3

PASER - Sepak bola di Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) khususnya di Kabupaten Paser kini memulai kembali langkah barunya. Pasalnya, di Bumi Daya kini hadir klub bernama Paser United. Tentunya, ini menjadi salahsatu daya tarik yang luar biasa bagi para penggemarnya.

Keseriusan klub ini juga dilakukan dengan mendaftarkan diri ke Asosiasi Provinsi (Asprov) Persatuan Sepak bola Seluruh Indonesia (PSSI) Kaltim untuk masuk dalam kompetisi Liga 3 musim 2023/2024, pada 28 September 2023 lalu.

Kehadiran tim yang dijuluki Laskar Segentar Bumi ini, turut diapresiasi Askab PSSI Paser. Menurut Ketua Askab PSSI Paser, Syahdan, tentunya Paser United berpotensi besar untuk mewarnai persepakbolaan di Provinsi Kaltim.

"Alhamdulillah Paser United sebagai klub baru siap bersaing untuk kompetisi liga 3," kata Ketua Askab PSSI Kabupaten Paser, Syahdan, Selasa (3/10/2023).

Meski masih terbilang baru, mimpi besar klub baru ini tak ingin sekadar hadir sebagai pelengkap kompetisi Liga 3 regional Kaltim. Namun, untuk

memperebutkan jatah lolos menuju putaran nasional.

"Mudah-mudahan kedepannya bisa eksis sampai kancah tertinggi di persepakbolaan liga Indonesia. Terima kasih kepada pemilik klub ada bang Arie Yohanda, Hotman Butar-Butar, dan Bayu Arismanto Aditya yang mendirikan Paser United," tutur Syahdan.

Sekretaris Askab PSSI Paser, Ismail Marzuki mengharapkan, dengan hadirnya klub baru ini, menjadi semangat bersama kebangkitan sepakbola di selatan Provinsi Kaltim ini. Pihaknya juga siap membantu memperjuangkan Paser United.

"Kami Askab PSSI Paser siap membantu semaksimal terkait apa yang memungkinkan menjadi kendala Paser United," tegas Ismail.

Sementara itu, Presiden Paser United, Arie Yohanda menuturkan, pada dasarnya jajaran manajemen bersama Askab PSSI Paser memiliki tujuan dan harapan yang sama, yaitu memajukan sepakbola.

"Selain itu saya juga hobi sepakbola, sehingga tanpa keraguan bersama teman-teman mendirikan Paser United," sebut-

nya.

Pengalaman bekerja di perusahaan swasta dijadikannya sebagai modal untuk mengelola manajemen klub. Sementara terhadap target, ia masih memantau perkembangan yang ada. Yang pasti, calon pelatih kepala untuk mengarsiteki Paser United disebutnya cukup bergengsi.

"Nantinya juga dilakukan seleksi terbuka. Pastinya banyak pemain muda usia 22 yang diseleksi dan dipadukan dengan pemain senior. Untuk jadwal seleksi nantinya akan diinformasikan kembali," terang Arie.

Ia berharap dukungan lain perlu didapatkan untuk menembus kompetisi Liga 3. Adanya Paser United diharapkan dapat memajukan sepakbola dan memberikan ruang bagi anak muda yang berbakat untuk menambah pengalaman di lapangan hijau.

Untuk diketahui, kick off Liga 3 dijadwalkan usai babak kualifikasi (BK) pada November 2023 mendatang. Selain Paser United, Asprov PSSI Kaltim juga memiliki anggota baru. Yakni RMK dari Samarinda, Persikukar dan Balikpapan United.

Pewarta : Bhakti Sihombing
Editor : Nicha Ratnasari

KORAN DIGITAL

radar.
MEDIA

RADAR SAMARINDA

EDISI RABU
4 OKT 2023

AKTUAL & TERPERCAYA

.COM



3 PRIA DIRINGKUS POLSEK SUNGAI PINANG, AMANKAN 11 POKET SABU

MUDA
BERAHLAK
AMANAH
DINAMIS



ARIE
WIBOWO

CALEG DPRD KOTA SAMARINDA
DAPIL 5 SAMARINDA UTARA - SUNGAI PINANG



Wakil Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian

KASUS BULLYING VIRAL DI CILACAP DAN BALIKPAPAN, HETIFAH ANGKAT BICARA

SAMARINDA - Wakil Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian menegaskan perbuatan bullying di sekolah adalah sesuatu yang berbahaya dan harus dicegah. Hal itu dikemukakannya berkaitan dengan kasus bullying siswa sekolah yang terjadi di Cilacap dan Balikpapan yang lagi viral di media sosial.

"Jadi bullying bukan sesuatu yang biasa, jangan sampai ada tindakan kekerasan sesama teman di lingkungan sekolah," ujar Hetifah.

Ia mengatakan praktik-praktik bullying bukan hanya fisik kadang juga nonfisik. Misalnya, berkata kasar atau bahkan perundungan di dunia maya (cyber bullying).

Hetifah menjelaskan pemerintah telah meluncurkan episode ke -25 yaitu pencegahan dan penanganan kekerasan di satuan pendidikan. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa kekerasan di sekolah bisa diminimalisir sebanyak mungkin.

"Pihak sekolah harus punya channel untuk mengadu jika peserta didik terkena masalah, selain itu guru BK harus beda, jangan jadi killer terus ditakuti tapi menjadi teman yang baik bagi peserta didik," kata Hetifah.

Hetifah juga menyoroti peran orang tua da-

lam mencegah bullying di sekolah. Menurutnya orang tua harus menciptakan suasana rumah yang menyenangkan dan membahagiakan bagi anak-anak, bukan menekan atau membully mereka, yang kemungkinan akan melampiaskan ke teman sejawatnya.

"Jadi supaya membentuk mental anak dari kecil, maka bisa PAUD sehingga punya jiwa kreatif, karena seorang anak dalam keadaan tertekan tidak mungkin jadi kreatif," ucapnya.

Hetifah mengimbau agar orang tua membangun komunikasi dan kedekatan dengan anak-anaknya. Orang tua harus mengetahui masalah yang dihadapi anak, termasuk jika mereka mengalami bullying di sekolah.

"Sebagai orang tua kita harus punya komunikasi yang lebih tertata dan percaya dengan anak. Orang tua harus berubah jadi teman bagi anak-anak," tuturnya.

Hetifah menambahkan pemerintah juga telah melakukan assesment terhadap sekolah-sekolah terkait isu bullying.

"Jika ada sekolah yang terbukti melakukan bullying, maka rapor mereka akan merah. Tetapi jika sekolah terlihat menyenangkan biasanya prestasi anak lebih bagus," jelas Hetifah. **(MK)**



Tampilan dari Kanal YouTube (dari kiri) Moderator Ir. H. Salman Lumoindong, MM dari Widyaswara BPSDM Provinsi Kaltim, Narasumber Hospita Gloria Situmorang, S.H.,M.AP, Kepala Bidang Pengembangan dan Supervisi Kepegawaian Regional Kalimantan, dan Kepala Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Pengelolaan Kelembagaan BPSDM Kaltim Siti Djaitun S.Sos MSi

BPSDM KALTIM GELAR SHARING SESSION TERKAIT PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN KARIR JABATAN FUNGSIONAL ASN

SAMARINDA - Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kalimantan Timur (Kaltim) menggelar Sharing Session ke-43 dengan tema "Pengelolaan dan Pengembangan Karir Jabatan Fungsional" untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) dilingkungan Provinsi Kaltim dan Luar Kaltim pada hari Selasa (3/10/2023). Kegiatan yang disiarkan secara live di Channel YouTube BPSDM Kaltim ini dimulai pukul 10.00 Wita hingga 12.00 Wita.

Kepala BPSDM Kaltim, Nina Dewi yang diwakilkan Kepala Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Pengelolaan Kelembagaan BPSDM Kaltim Siti Djaitun ini, dalam catatannya mengatakan BPSDM Kaltim berkomitmen dan berupaya untuk terus mengembangkan kapasitas ilmu pengetahuan ASN.

"Kami tetap optimis untuk terus meningkatkan kapasitas pengetahuan ASN salah satunya dengan menggelar metode sharing Session ini," ujarnya.

Dia berharap para peserta khususnya ASN fungsional bisa menyerap ilmu yang disajikan

an dalam sharing session ke-43 ini dengan sebaik-baiknya, terutama ilmu dalam pengelolaan dan pengembangan karir jabatan fungsional.

"Kami berharap semua peserta terkhusus ASN dengan jabatan fungsional bisa mengambil ilmu pengetahuan ini dengan sebaik-baiknya," harapnya.

Kegiatan Sharing Session ini digelar secara daring menggunakan aplikasi Zoom untuk para peserta dan acara ini juga disiarkan secara langsung dari kanal YouTube BPSDM Kaltim untuk ditonton oleh masyarakat secara umum.

Pada Sharing Session kali ini menampilkan Kepala Bidang Pengembangan dan Supervisi Kepegawaian Regional Kalimantan Hospita Gloria Situmorang sebagai narasumber dan dimoderatori oleh Widyaswara BPSDM Kaltim Ir. H. Salman Lumoindong, MM.

Acara ini sejak di buka diikuti 301 peserta dan hingga berita ini diterbitkan sudah diputar 300 kali.(adv)

Pewarta : Hanafi

Editor : Nicha Ratnasari



Pustakawan Ahli Muda Patimah Irni SPd MSi

KELILING KALIMANTAN, DPKD KALTIM SIAP KERJA SAMA KEMBANGKAN BUDAYA DAN PELESTARIAN NASKAH KUNO

SAMARINDA - Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah (DPKD) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) akan berkeliling pulau Kalimantan untuk meningkatkan kerja sama. Hal ini merupakan hasil kesepakatan dari Rapat Koordinasi Pengembangan Center of Excellent Budaya Kalimantan dan Sosialisasi Pelestarian Naskah Kuno, yang sebelumnya telah dilaksanakan di Taman Pintar Tenggara, Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) pada Juli 2023 lalu.

Keliling Kalimantan ini dalam rangka mengunjungi DPKD yang belum menandatangani Perjanjian Kerja Sama dengan DPKD Kaltim. Sejauh ini yang telah bertanda tangan baru DPKD Kaltara, sisanya adalah Kalsel, Kalteng dan Kalbar.

"Waktu kita rakor, semua perwakilan dari 5 provinsi di Kalimantan itu setuju adanya kerja sama kebudayaan. Tapi waktu itu cuma dihadiri oleh kabid-kabidnya saja. Oleh sebab itu kami yang akan berkunjung ke dinas perpustakaan yang ada di Kalsel, Kalteng dan Kalbar," ungkap Pustakawan Ahli Muda Patimah Irni saat ditemui mediakaltim.com di ruang kerjanya Senin (2/10/2023) lalu.

Pihak DPKD Kaltim sudah melakukan rapat internal untuk penentuan kapan akan berangkat keliling ke tiga provinsi tersebut.

"Kita target sih bulan Oktober ini jadwal sudah siap, tapi paling tidak November sudah selesai semua PKS ini" tegasnya.

Dengan ditanda tangannya PKS tersebut nantinya, kerja sama antar provinsi se-Kalimantan untuk melestarikan Budaya dan naskah kuno bisa dijalankan.

Kerja sama ini penting karena mengacu pada Surat Keputusan Kepala Perpustakaan Nasional RI Nomor 78a tahun 2011 hanya ada enam Badan Perpustakaan Provinsi yang

ditetapkan menjadi Center of Excellent, dan Kaltim salah satunya.

Penunjukkan Kaltim sebagai Center of Excellent sudah dilakukan sejak beberapa tahun lalu. Namun, hingga sekarang belum ada perkembangan kegiatan atas program yang harus dijalankan.

Daerah yang ditunjuk sebagai Center of Excellent sendiri memiliki tugas untuk memenuhi kebutuhan pemustaka terhadap informasi tentang budaya-budaya yang ada di Indonesia, khususnya budaya dan etnis di Kalimantan.

Selain itu, Irni mengatakan DPKD Kaltim telah mengembangkan website *Pustaka Borneo* yang akan digunakan sebagai wadah untuk mengenalkan semua kultur budaya yang ada di Kalimantan.

"Jadi kita juga sudah sosialisasi *Web Pustaka Borneo*, semua konten budaya yang ada di Kalimantan bisa kita muat disana, nanti semua konten budaya yang diajukan dari seluruh Kalimantan, sebelum di upload pastinya akan berkoordinasi dengan kami di sini terlebih dahulu sebagai pengelola website *Pustaka Borneo*," ujarnya.

Karena pentingnya sejarah, budaya dan kultur Kalimantan untuk dikembangkan, maka DPKD Kaltim berharap hal ini didukung oleh semua elemen pemerintahan dan masyarakat agar kebudayaan Kalimantan bisa terjaga.

"Tentunya kami juga membutuhkan dukungan oleh semua elemen masyarakat dan pemerintahan, terutama kalo bisa Anggota DPRD Kaltim pun harus mendukung, agar lebih mudahnya dalam pengembangan kebudayaan, sejarah dan pelestarian naskah-naskah kuno ini," tutupnya. (ADV)

Pewarta : Hanafi

Editor : Nicha Ratnasari



POLISI UNGKAP JARINGAN NARKOBA DI PALARAN, SITA 3 POKET SABU, 2 TERSANGKA DIBEKUK

SAMARINDA - Unit Reskrim Polsek Palaran, Polresta Samarinda, Polda Kaltim berhasil mengungkap kasus penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu serta mengamankan penjual dan kurir, Senin (3/10).

Keberhasilan operasi ini dimulai informasi yang diterima dari masyarakat sekitar. Mereka melaporkan bahwa di sekitar Jalan Gaya Baru, Kelurahan Rawamakmur, Kecamatan Palaran sering terjadi transaksi jual beli narkoba. Berbekal informasi ini, unit operasional (opsnal) Polsek Palaran segera melakukan penyelidikan.

Namun, upaya penyelidikan awal menemui jalan buntu karena pelaku yang menjadi target opsnal cukup lihai dan sering berpindah-pindah tempat.

Meskipun demikian, petugas tidak menyerah begitu saja. Mereka terus melanjutkan perburuan dan akhirnya berhasil menemukan letak persembunyian dari pengedar barang haram tersebut.

Pukul 03.00 dini hari, tim opsnal melakukan penggerebekan dan berhasil mengamankan seorang kurir dengan inisial DDT (25) yang hendak mengirim narkoba jenis sabu-sabu. Bersama dengan kurir tersebut, petugas juga berhasil mengamankan barang bukti berupa 2 poket sabu-sabu dengan berat bruto masing-masing 0,22 gram dan 0,24 gram.

Tidak hanya kurir, tim opsnal juga mengamankan penjual sabu-sabu dengan inisial AM (34). Bersama penjual, petugas menemukan 1 poket sabu-sabu yang tergeletak di lantai rumah pelaku. Kedua pelaku beserta barang bukti langsung diamankan di Polsek Palaran.

Kedua pelaku ini dijerat dengan pasal 114 Sub Pasal 112 Sub pasal Subs 132 UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Mereka berpotensi mendapatkan hukuman pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun, serta pidana denda paling sedikit Rp. 1 Miliar dan paling banyak Rp. 10 Miliar Rupiah.

Kapolsek Palaran, Kopol Zarma Putra, S.Sos, menyatakan bahwa kedua pelaku merupakan target operasi Polsek Palaran. Selain barang bukti berupa 3 poket narkoba jenis sabu-sabu, petugas juga berhasil mengamankan 3 buah handphone. Pelaku masih dimintai keterangan guna pengembangan jaringan narkoba di wilayah Palaran.

Kapolsek menjelaskan bahwa pelaku DDT merupakan warga Palaran yang tinggal di Jalan Gaya Baru, sedangkan AM merupakan warga Dusun Sukamaju, Kecamatan Ampelgading, Kabupaten Malang, yang berdomisili di Jalan Gaya Baru (sewa kontrak). (rls)

Editor: Agus Susanto

3 PRIA DIRINGKUS POLSEK SUNGAI PINANG, AMANKAN 11 POKET SABU

SAMARINDA - Jajaran Unit Reskrim Polsek Sungai Pinang berhasil ungkap kasus penyalahgunaan Narkotika jenis sabu dengan mengamankan 3 orang pria dan barang bukti 11 poket sabu, pada Jumat (29/9/2023) malam.

Berawal dari ketajaman personel Unit Opsnal Reskrim Polsek Sungai Pinang melihat seorang laki laki yang duduk di atas kendaraan sepeda motor dengan gerak gerik mencurigakan di Jl. D.I. Pandjaitan, Kelurahan Sungai Pinang Dalam. Kemudian, setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan dalam saku celana pria tersebut berupa 1 poket narkotika jenis sabu-sabu berat 0,56 gram beuto, 1 batang sedotan minuman mineral dan 1 unit HP merk Infinix warna putih.

Pria yang diketahui berinisial MS ini kemudian menyebutkan bahwa dirinya membeli barang haram tersebut dari seorang pria berinisial AA yang beralamat di sekitar Jl. Otto Iskandardinata Kelurahan Sungai Dama. Bergerak cepat, unit opsnal Reskrim Polsek Sungai Pinang langsung mendatangi lokasi rumah yang disebutkan oleh MS dan personel bertemu dengan AA serta TN.

Dari hasil penggeledahan rumah AA, personel berhasil menyita 9 poket narkotiba jenis sabu berat 8,55 gram bruto, 1 unit Timbangan Digital, 2 sendok penakar, 1 buah jarum, 1 buah Kotak Charge warna hijau, 1 unit HP Merk Nokia senter warna hitam, 1 unit HP Merk Vivo warna biru, uang tunai Rp 2.120.000 dan 1 buah buku catatan hasil penjualan yang



disembunyikan AA di bawah meja dapur rumahnya.

Sementara sdr. TN kedapatan menyimpan pada saku celananya bagian kiri berupa 1 poket narkotika jenis sabu berat 0,43 gram bruto, 1 buah Pipet kaca, 1 unit HP merk Samsung Warna Hijau dan uang tunai Rp 150.000,- di duga uang hasil penjualan.

Ketiga orang tersebut beserta barang bukti langsung digiring ke Polsek Sungai Pinang dan dijerat dengan pasal 114 Sub Pasal 112 Sub pasal Subs 132 UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dengan ancaman hukuman pi-

dana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 1 miliar dan paling banyak Rp 10 miliar.

"Dari 3 orang yang diamankan, 2 di antaranya diduga memiliki peran sebagai penjual karena ditemukan uang tunai yang diduga hasil penjualan serta sebuah buku catatan hasil penjualan dan ini masih terus kami dalam," jelas Kopol Ahmad Abdullah S.H., M.H. Kapolsek Sungai Pinang. Senin (2/10/2023). (rls)

Editor : Nicha Ratnasari